

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA**



**MEMBANGUN *SMART SECURITY* GUNA MEWUJUDKAN
KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
DI IBU KOTA NUSANTARA**

Oleh :

KOMBES POL. SATRIA RIZKIANO, S.I.K, M.Si.,M.M.

No.Peserta : 079/POLRI

KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXVI
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Assalaamu 'alaikum Warohmatullahi wabarokatuh, Salam sejahtera bagi kita semua.

Segala puji bagi Alloh Subhanahu Wata'ala yang senantiasa melimpahkan taufik, hidayah dan innayah-Nya kepada kami sehingga dapat menyelesaikan Ketas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) ini sebagai sebagian persyaratan kelulusan dari Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI Lemhannas RI Tahun 2024. Adapun judul Taskap yang disetujui oleh Lemhannas R.I berjudul **"Membangun *Smart Security* Guna Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Ibu Kota Nusantara"**.

Dalam menyusun Taskap ini, penulis mendapatkan bimbingan dari Tutor Taskap berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor: 23 Tahun 2024 tanggal 30 Januari 2024 tentang Penetapan Tutor pendamping Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI Tahun 2024 Lemhannas RI.

Oleh karena itu, izinkanlah penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua, mertua, istri, anak maupun keluarga besar, maupun kepada Yth. :

1. Letnan Jenderal TNI Eko Sumargiyono, M.A. selaku Plt.Gubernur Lemhannas R.I beserta staf.
2. Komisariss Jenderal Polisi R.Z.Panca Putra, M.Si. selaku Sekretaris Utama Lemhannas R.I. beserta staf.
3. Marsekal Muda TNI Andi Heru Wayudi selaku Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI beserta staf

4. Bapak Dr.K.P.Suharyono S.Hadiningrat, M.M. selaku Tutor Taskap yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan Taskap ini.
5. Para sahabat Peserta PPRA LXVI Lemhannas R.I Tahun 2024 yang telah memberikan dukungan demi suksesnya pendidikan di Lemhannas R.I
Maupun para pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dihadapkan dengan latar belakang Penulis dalam penguasaan akademis dan terbatasnya waktu penulisan, maka kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan dari semua pihak, guna penyempurnaan penulisan Taskap ini. Besar harapan Penulis semoga Taskap ini dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan pemikiran Penulis kepada Lemhannas RI, Pemerintah Republik Indonesia, Keplisian Republik Indonesia maupun Otorita IKN Nusantara.

Dan semoga Alloh Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbinganNya kepada kita, dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.



Jakarta, Agustus 2024

Peserta PPRA LXVI

Satria Rizkiano, S.I.K, M.Si., M.M.

Kombes Pol NRP. 73030686

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Satria Rizkiano, S.I.K., M.Si., M.M.**
Pangkat/NRP : Komisariss Besar Polisi NRP. 73030686
Jabatan : Analis Kebijakan Madya Bid.Bindiklat
Instansi : LEMDIKLAT POLRI

Adalah Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI Lemhannas R.I. Tahun 2024 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Materai rp10000

Satria Rizkiano, S.I.K, M.Si.,M.M.
Kombes Pol. NRP. 73030686

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan dibawah ini Tutor Taskap dari :

Nama : **Satria Rizkiano, S.I.K, M.Si.,M.M**

Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI
Lemhannas RI Tahun 2024 (No.079/POLRI)

Judul Taskap: **“Membangun *Smart Security* Guna Mewujudkan
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Ibu Kota
Nusantara”.**

Taskap tersebut diatas telah ditulis “sesuai/tidak sesuai” dengan Petunjuk Teknis Tentang Penulisan Ilmiah Peserta Pendidikan Lemhannas RI, Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 24 Tahun 2022, karena itu “layak/tidak layak” dan “disetujui/tidak disetujui” untuk diuji.

Jakarta, Agustus 2024

Tutor Taskap

~~“coret yang tidak diperlukan”~~

Dr.K.P.Suharyono S.Hadiningrat,M.M.
Tenaga Profesional Bidang Ekonomi

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	4
3. Maksud dan Tujuan	5
4. Ruang lingkup dan Sistematika	5
5. Metode dan Pendekatan	6
6. Pengertian	7
BAB II LANDASAN PEMIKIRAN	
7. Umum	10
8. Peraturan Perundang-undangan	11
9. Kerangka Teoritis	12
10. Lingkungan Strategis	21
11. Data/Fakta	22

BAB III PEMBAHASAN

12. Umum	28
13. Konsep <i>Smart Security</i>	30
14. Dampak <i>Smart Security</i> terhadap Kamtibmas di IKN	49
15. Upaya-upaya dalam Membangun <i>Smart Security</i>	54
16. Hasil Analisis	62

BAB IV PENUTUP

17. Simpulan	63
18. Rekomendasi.....	64

DAFTAR PUSTAKA	65
-----------------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN	67
------------------------------	-----------

1. ALUR PIKIR
2. RIWAYAT HIDUP PENULIS



DAFTAR GAMBAR

Gambar 01	Smart City Model	15
Gambar 02	Security, Surety, Safetu and Peace	17
Gambar 03	Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia	21
Gambar 04	Lingkungan Strategis	22
Gambar 05	Peta IKN Nusantara	24
Gambar 06	Tujuh Belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	25
Gambar 07	Model Kolaborasi <i>Pentha Helix</i>	27
Gambar 08	Matrik Analisis SWOT	31
Gambar 09	Matrik Perhitungan IFAS	39
Gambar 10	Matrik Perhitungan EFAS	41
Gambar 11	Matrik Perhitungan SFAS	44
Gambar 12	Matrik Grand Strategy SWOT Analysis	47
Gambar 13	Matrik Grand strategy dari Hasil Analisis SWOT	48





BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perpindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur bukan hanya memberikan beragam manfaat saja, namun disisi lain ada potensi kerawanan antara lain potensi ancaman potensial yang berhubungan dengan posisi geografis dan perbatasan dengan negara tetangga seperti Malaysia. Selain itu, letak IKN dekat dengan jalur ALKI II yang menimbulkan kerentanan terhadap ancaman keamanan nasional serta senjata balistik modern. Secara futuristik, IKN mampu menjadi kota yang memiliki konsep berkelanjutan pada taraf internasional, roda penggerak ekonomi Indonesia dan proyeksi dari identitas bangsa yang memberikan cerminan pluralistik dan kemajemukan Bangsa Indonesia dengan mengacu pada Pancasila dan UUD 1945.

Dalam kaitan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), POLRI memiliki peran penting dalam proses menjaga kamtibmas secara nasional; dimana kamtibmas merupakan keadaan atau dinamika yang terjadi pada masyarakat sebagai prasyarat dalam penentuan keberhasilan pembangunan nasional. Ciri dari keberhasilan tersebut meliputi legitimasi hukum, keamanan, ketertiban, dan rasa tenang pada masyarakat yang memiliki implikasi terhadap pengembangan agar melakukan penangkalan, pencegahan dan penanggulangan terhadap pelanggaran hukum.¹ Pada proses pemindahan IKN, Presiden Indonesia Joko Widodo pada tahun 2021 memberikan pertimbangan khusus dengan kondisi masyarakat di Kalimantan Timur khususnya masyarakat yang berada di sekitar wilayah IKN dengan pengintegrasian teknologi sesuai dengan kebutuhan. Dimana proses tersebut mencakup pembangunan fisik dan sosial yang bersinergi dengan teknologi dan berkelanjutan dengan mengacu pada perundangan yang berlaku. Tujuan dari pemindahan tersebut diproyeksikan akan memberikan solusi terhadap kesenjangan sosial ekonomi dalam hal

¹ Adi, Isbandi Rukminto. 2008. Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. PT Grafindo Persada, Jakarta.

pembangunan wilayah Indonesia bagian barat dan timur. Namun, kendala yang dihadapi dalam proses pengamanan ini sejalan dengan laju peningkatan modernisasi teknologi yang berpengaruh pada peradaban masyarakat. Dalam artian pembangunan teknologi harus mengacu pada konsep pengamanan yang modern dengan mengadopsi sistem 5.0. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit ketika peletakan batu pertama pembangunan Polres Khusus IKN.²

Membangun *Smart security* sendiri memiliki konsep yang terpadu dengan layanan tanggap darurat yang dilakukan oleh POLRI dengan sistem yang menggunakan konsep modern seiring dengan IKN menjadi *smart city*. Juga menggunakan pelayanan menggunakan digitalisasi dengan pelibatan secara koheren dengan komunitas dan masyarakat. Sistem pengamanan yang didukung oleh kapabilitas Sumber Daya Manusia POLRI yang fit dan prima, yang dibarengi oleh keahlian dibidang teknologi digital. Hal tersebut ditujukan untuk mendukung operasional smart security dengan piranti CCTV, *body worn camera*, *big data* yang saling terpadu dengan K/L dengan mengacu pada *command center dan artificial intelligence*. Penerapan konsep ini ditujukan agar minat investor di Indonesia semakin tinggi karena dirasa aman. Dengan demikian, percepatan pembangunan IKN mampu memenuhi kebutuhan filosofisnya yaitu Indonesia-Sentris. POLRI telah menunjukkan komitmennya dengan penerahan sumberdaya secara komprehensif agar terlaksananya pembangunan IKN dengan konsep *smart security*.

Adanya tantangan pada pembangunan sosial di IKN yang dinamis dan beragam diperlukan upaya yang komprehensif agar tidak ada yang tertinggal. Hal tersebut dikarenakan kesenjangan dalam penggunaan teknologi dan ketertinggalan dari beberapa aspek kehidupan dengan pedatang baru yang berasal dari ibukota dari Jakarta maupun perwakilan yang berasal dari negara diluar Indonesia. Dihimpun dari data BPS wilayah Penajam Paser Utara (2022) bahwa beberapa kecamatan di Penajam Paser Utara (PPU) memiliki mata pencaharian sebagai petani. Misalnya

² Ibid

Kecamatan Sepaku sebagian besar masyarakatnya menjadi petani sawit, palawija, karet dan padi. Kemudian Kecamatan Samboja yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana mata pencaharian penduduknya sebagian besar adalah petani sawit, palawija dan padi serta dibidang perikanan. Padahal kecamatan-kecamatan ini memiliki potensi dalam bidang tambang, kebun kelapa sawit, kekayaan alam minyak dan gas bumi. Namun, ironisnya potensi kekayaan alam tersebut justru dieksplorasi dan dikuasai oleh pihak asing serta perusahaan nasional seperti PERTAMINA (Dewi, 2020).

Pentingnya Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) adalah kebutuhan setiap orang untuk menjalankan kehidupan bernegara. Kamtibmas adalah prasyarat penting untuk pembangunan nasional yang dinamis, sehingga potensi dampaknya beragam dan perlu dikelola agar tercipta kondisi yang kondusif. Dalam memelihara kamtibmas, POLRI harus bermitra dengan pemangku kepentingan lainnya karena kamtibmas adalah kebutuhan bersama. Menurut Abdulsyani (1994), kolaborasi merupakan keterpaduan dari tujuan bersama yang diperoleh dengan cara saling membantu. Sebagai bentuk proses sosial yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, kolaborasi dipengaruhi oleh kepentingan para pemangku kepentingan, sehingga perlu kesepakatan bersama agar pencapaian tujuan efektif dan efisien, terutama dalam membangun IKN Nusantara.

Pembangunan fisik IKN sebagai *smart city* sekarang sedang berlangsung secara bertahap, nantinya akan dikembangkan pula *smart security* dimana konsepnya berpijak pada pemolisian yang menggunakan teknologi digital. Rujukannya adalah UU No.3 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara. Kondisi saat ini, konsep *smart security* masih dalam perencanaan sebagaimana disampaikan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pada saat peletakan batu pertama Pembangunan Kantor Polresta Khusus IKN pada tahun lalu. Sehingga belum dipublikasikan kepada masyarakat. Disisi lain, kemajuan teknologi digital mengakibatkan disrupsi yang memunculkan gap/kesenjangan dalam penguasaan teknologi digital. Gaya dan hidup yang serba digital memerlukan literasi yang

memadai. Perubahan yang dinamis ini menuntut pemerintah untuk melakukan akselerasi dan literasi kepada masyarakat dalam memanfaatkan kemajuan teknologi digital tersebut terutama dalam membangun smart security di IKN yang merupakan bagian dari *smart city* yang sedang dibangun. Saat ini kita berada pada tahap transformasi dari pengamanan konvensional menuju pengamanan berbasis digital. Hal tersebut penting untuk menerapkan konsep membangun *smart security* guna mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat di IKN Nusantara.

2. Rumusan Masalah

Pembangunan *smart city* dimana sistem keamanan akan didukung oleh peralatan dan sistem digital yang canggih hendaknya memudahkan mobilitas dan aktivitas masyarakat sehingga rasa aman akan terwujud di dalam menjalani kehidupan bermasyarakat di Ibu Kota Nusantara. Transformasi dari pola lama yang konvensional ke pola baru yang serba modern dapat mengakibatkan disrupsi baik dalam memanfaatkan sistem baru maupun menyesuaikan dengan budaya baru yang belum pernah alami sebelumnya. Proses transformatif tidak serta merta dapat diatasi manakala literasi dalam masyarakat tidak ditingkat seiring dengan kemajuan zaman berbasis inovasi teknologi. *Digital gap* atau kesenjangan digital akan menjadi kendala utama dalam menerapkan *smart city* di IKN Nusantara, termasuk *smart security*. Pemolisian hendaknya dijadikan pola pelibatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kamtibmas di IKN Nusantara maupun daerah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kita tidak boleh terperangkap dalam transaksi membeli peralatan saja, namun harus menyiapkan SDM Talenta untuk mengelola *smart security* sehingga terjamin kemandirian dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jangan pula, membangun IKN Nusantara menjadikan penduduk menjadi terasing di kampunya sendiri.

Dalam Taskap ini, rumusan masalahnya adalah **“Bagaimanakah membangun *smart security* guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di IKN Nusantara ?**

Dengan pertanyaan-pertanyaan kajian sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah konsep *smart security* guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di IKN Nusantara ?
- b. Bagaimanakah dampak *smart security* terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat di IKN Nusantara?
- c. Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan untuk *smart security* guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di IKN Nusantara?

3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud Penulisan TASKAP

TASKAP ini dimaksudkan untuk memenuhi sebahagian persyaratan kelulusan dari Program Pendidikan Reguler Angkatan LXVI (PPRA LXVI) Tahun 2024 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas RI).

- b. Tujuan Penulisan TASKAP

TASKAP ini bertujuan untuk menemukan dan menggambarkan :

- 1) Konsep, hambatan dan tantangan dalam membangun *smart security* guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di IKN Nusantara.
- 2) Dampak *smart security* terhadap Kamtibmas di IKN Nusantara.
- 3) Untuk menganalisa upaya yang dilakukan untuk membangun *smart security* guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di IKN Nusantara.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

- a. Ruang lingkup.

Ruang Lingkup meliputi cara untuk membangun *smart security* guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di IKN Nusantara, dimana wilayahnya meliputi wilayah Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kecamatan Samboja dan Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dalam Taskap ini meliputi :

- 1) *Smart security system*
- 2) Keamanan dan Ketertiban Masyarakat IKN Nusantara

3) Kota Cerdas (*Smart City*) IKN Nusantara.

Dengan fokus pada pembahasan variabel X yaitu “*membangun smart security*” dikaitkan dengan kamtibmas maupun ketahanan nasional.

b. Sistematika

Sistematika Taskap ini terdiri dari 4 (empat) Bab yang saling terkait antara Bab satu dengan Bab lainnya, dengan Sistematika sebagai berikut : 1) BAB I : PENDAHULUAN berisi : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup dan Sistematika, Metode & Pendekatan, dan Pengertian-pengertian. 2) BAB II : LANDASAN PEMIKIRAN berisi : Umum, Alur Pikir, Peraturan dan Perundang-undangan, Teori Kota Cerdas (*Smart City*), Teori Keamanan Cerdas (*Smart Security*), Teori Keamanan & Ketertiban Masyarakat, dan Teori Ketahanan Nasional), Lingkungan strategis, Data/fakta & Kondisi saat ini, Tantangan & Hambatan, Dampak Keamanan Cerdas (*smart security*) dan Upaya & strategi; 3) BAB III : PEMBAHASAN berisi : Umum, Penyajian data & pembahasan, dan Hasil Analisis; dan 4) BAB IV : PENUTUP berisi : Kesimpulan dan Rekomendasi.

5. Metode dan Pendekatan

Mengacu pada latar belakang tersebut, berikut ini adalah metode penelitian ini :

a. Metode

Metode penelitian yang digunakan pada Taskap mengacu pada metode deskriptif untuk memperoleh penggambaran dan penganalisaan tentang variabel yang memiliki korelasi sangat erat dengan pembangunan smart security guna mewujudkan kamtibmas di IKN Nusantara (Suharsimi, 2011). *Tools* yang dipergunakan dalam menganalisis variabel adalah adalah SWOT Analysis.

b. Pendekatan

Pendekatan kualitatif dipergunakan sebagai penggambaran terhadap konseptual dan variabel serta pembahasan yang

disampaikan melalui penulisan naratif atau sering disebut dengan non numerik yang membahas penelitian menggunakan penafsiran data dan fakta. Proses selanjutnya adalah analisa untuk memberikan gambaran fenomena pembangunan smart security guna mewujudkan kamtibmas di IKN Nusantara .

Dengan metode dan pendekatan tersebut, Taskap ini diharapkan memiliki keterbaharuan (*novelty*). Keterbaharuan dari Taskap ini adalah menemukan *smart security system* guna mewujudkan kamtibmas di IKN Nusantara.

6. Pengertian-Pengertian

Dalam penulisan Taskap ini untuk menghindari perbedaan dalam penafsiran dan untuk menyatukan persepsi dalam pembahasan berikutnya, maka dalam Taskap ini digunakan beberapa pengertian sebagai berikut :

- a) *Smart city* adalah operasional kota dengan kecanggihan teknologi melalui sensor dan data analitik, smart city mengelola infrastruktur secara real-time, menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan.
- b) *Smart Security*: Penggunaan teknologi cerdas untuk meningkatkan keamanan dan perlindungan aset serta individu. Teknologi ini mencakup penggunaan sensor, kamera pengawas dengan kecerdasan buatan, sistem akses kontrol berbasis biometrik, dan perangkat IoT yang dapat terhubung dan berkomunikasi untuk memberikan respons cepat terhadap ancaman keamanan. Smart security bertujuan untuk mengurangi risiko kejahatan dan memastikan lingkungan yang lebih aman melalui pemantauan otomatis dan analisis data real-time.
- c) Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)
Kamtibmas adalah kondisi di mana masyarakat dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan aman dan tertib tanpa gangguan yang berarti. Ini mencakup upaya-upaya untuk mencegah dan menangani berbagai bentuk kejahatan, konflik sosial, dan gangguan ketertiban lainnya. Kamtibmas melibatkan partisipasi aktif masyarakat,

kepolisian, dan instansi terkait lainnya dalam menjaga ketertiban umum.

- d) Ibu Kota Nusantara adalah Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang baru berdasarkan UU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional.

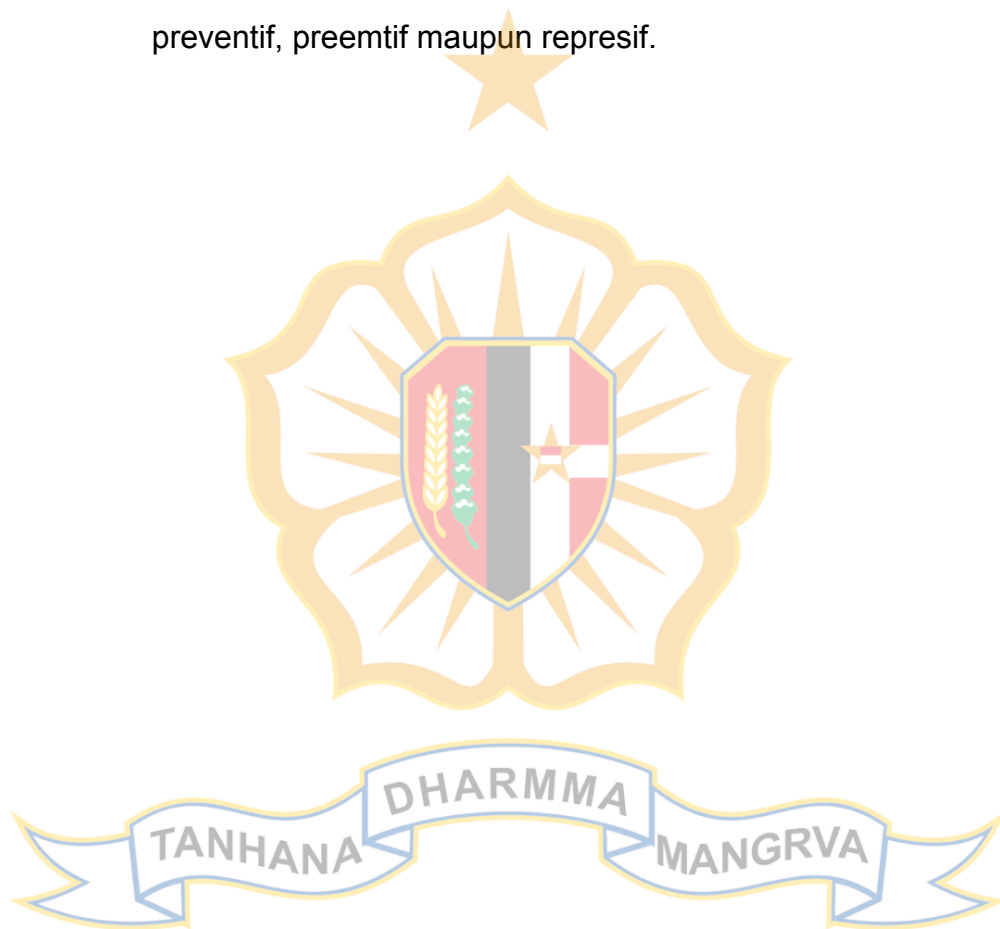
IKN Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk: a. menjadi kota berkelanjutan di dunia; b. sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan; dan c. menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Saat ini menjadi proyek strategis nasional sedang dalam tahap pembangunan fisik.

- e) Ketahanan Nasional, adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. Secara konseptual Ketahanan nasional merupakan pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD NRI 1945 dan Wawasan Nusantara. Dengan kata lain, konsepsi Ketahanan Nasional adalah pedoman (sarana) untuk meningkatkan (metode) keuletan dan ketangguhan bangsa yang

mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan keamanan dan kesejahteraan.

- f) Futuristik adalah sebuah rancangan dan desain tentang masa depan (*future*) yang sebenarnya, tidak hanya identik dengan sebuah konstruksi bangunan namun menyangkut pula pikiran, tindakan, idealisme dan spirit tentang masa depan.
- g) Pemolisian adalah segala upaya polisi untuk menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat melalui Tindakan preventif, preemtif maupun represif.



BAB II

LANDASAN PEMIKIRAN

7. Umum

Membangun *smart security* merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung *smart city* di IKN Nusantara. Pembangunan IKN Nusantara disamping dapat memajukan bangsa dan negara, juga berpotensi memperlebar ketimpangan antara masyarakat lokal dengan pendatang baru dari ASN, TNI/POLRI, ex- Kementerian/Lembaga ibu kota Jakarta ke Nusantara. Tingkat perbedaan yang mencolok akan berpotensi menimbulkan kecemburuan, konflik sosial bahkan disintegrasi manakala faktor-faktor penyebabnya tidak diatasi secara komprehensif melibatkan semua pemangku kepentingan. Untuk mengatasi tingkat perbedaan yang menimbulkan kesenjangan (*gap*) salah satu diantaranya melalui peningkatan literasi digital pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) secara bertahap, bertingkat dan terus-menerus; tidak terbatas pada mengatasi persoalan sesaat. Ibarat orang berlari, kondisi masyarakat lokal berada pada kilometer 10, sementara pendatang baru berada pada kilometer 90 bahkan 100.

Sehingga diperlukan upaya *extra ordinary* untuk dapat mengejar ketertinggalan. Oleh karena itu, harus ada program-program lompatan yang memadai baik aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi sebagai kebutuhan dasar. Diperlukan program-program keberpihakan (*affirmative policy*) untuk jangka waktu tertentu agar mereka berdaya dan mendapat akses yang signifikan ke OIKN, jangan sampai mereka hanya sebagai penonton dan terpinggirkan karena ketidakberdayaannya. Di sisi lain, mereka harus ditingkatkan literasi digitalnya agar mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan di IKN Nusantara yang berbasis *smart city*, termasuk *smart security* guna mewujudkan kamtibmas di IKN Nusantara.

Kesenjangan yang ada berpengaruh terhadap sikap masyarakat lokal dalam kontribusinya membangun NKRI, termasuk peran sertanya dalam mewujudkan kamtibmas. Komunikasi yang dinamis harus diarahkan agar masyarakat lokal maupun pendatang baru memiliki

kesadaran dan komitmen untuk bersama-sama membangun NKRI. Modelnya “mempersaudarakan” antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang baru sebagaimana “mempersaudarakan” kaum Muhajirin dengan kaum Anshar di Madinah Arab Saudi dibawah kepemimpinan Rasulullah Muhammad Shalallahu 'alai wassalam.

Alur Pikir yang dikembangkan sebagaimana Lampiran I, diawali dengan adanya kondisi saat ini dimana *smart security* di IKN Nusantara dimana masih dalam tahap perencanaan (*das sein*) dihadapkan dengan kondisi ideal *smart security* yang diharapkan (*das sollen*). Kemudian dirumuskan permasalahannya, yang dijabarkan dalam pertanyaan-pertanyaan kajian. Kemudian, fakta dan data dikumpulkan dan dianalisis menggunakan SWOT Analysis serta dengan pendekatan ketahanan nasional yang dipengaruhi oleh lingkungan strategis yang dinamis baik nasional, regional maupun global. Harapannya menghasilkan keluaran (*ouput*) terwujudnya kamtibmas yang kondusif dalam konteks “pemolisian yang harmoni” berbasis kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) agar *smart security* terbangun dan kamtibmas di IKN Nusantara terwujud. Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kerangka teoritis, lingkungan strategis, dan fakta/data yang berkaitan dengan latar belakang.

8. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam Taskap ini meliputi:

- a. UUD NRI 1945, beserta Amandemennya.

Tujuan Nasional Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 aline ke-4.

- b. UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

- c. UU No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, beserta peraturan turunannya. Pasal 2 Ibu Kota Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk:
 - a) menjadi kota berkelanjutan di dunia; b) sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan; dan c) menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. UU No.21 Tahun 2023 tentang Perubahan UU No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Pasal 2 (sama dengan titik c).
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat. Pasal 2 bahwa Pemolisian Masyarakat (Polmas) bertujuan untuk:
 - a) mewujudkan kemitraan Polri dan masyarakat yang didasarkan pada kesepakatan bersama untuk menangani dan memecahkan permasalahan yang menimbulkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan keamanan dan ketertiban; dan
 - b) meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat/komunitas terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dilingkungannya.

9. Kerangka Teoritis

- a. Teori Kota Cerdas (*Smart City*)
Teori Kota Cerdas atau *Smart City* adalah konsep yang menggabungkan teknologi yang maju dengan infrastruktur kota dalam peningkatan kualitas hidup warganya, meningkatkan efisiensi layanan kota, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Implementasi kota cerdas mencakup 6 (enam) indikator atau pilar utama.³

Berikut penjelasannya :

³ Albino, V., Berardi, U., & Dangelico, R. M. (2015). Smart Cities: Definitions, Dimensions, Performance, and Initiatives. *Journal of Urban Technology*, 22(1), 3-21.

1) *Smart Governance.*

Smart governance merujuk pada penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi dalam proses pemerintahan. Ini mencakup *e-government* (pemerintahan elektronik), yang memungkinkan warga untuk mengakses layanan publik secara online, memberikan umpan balik, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Teknologi ini juga digunakan untuk mengelola data kota, yang membantu pemerintah membuat keputusan yang lebih tepat dan responsif.⁴

2) *Smart Economy.*

Smart economy mencakup penggunaan teknologi untuk mendukung inovasi, kewirausahaan, dan pertumbuhan ekonomi. Ini melibatkan pengembangan ekosistem digital yang mendorong start-up dan bisnis berbasis teknologi. Kota cerdas mendukung ekonomi berbasis pengetahuan, di mana data dan informasi menjadi sumber daya utama. Ini juga mencakup perdagangan elektronik (*e-commerce*) dan layanan keuangan digital yang memudahkan transaksi bisnis dan memperluas akses pasar.⁵

3) *Smart Environment.*

Smart environment berfokus pada penggunaan teknologi untuk melindungi dan menjaga lingkungan. Ini mencakup pemantauan kualitas udara dan air secara *real-time*, pengelolaan limbah yang lebih efisien, dan penggunaan energi terbarukan. Teknologi seperti sensor lingkungan dan jaringan pintar (*smart grid*) sebagai upaya pengurangan dampak lingkungan. Kota

⁴ Hollands, R. G. (2008). Will the real smart city please stand up? Intelligent, progressive or entrepreneurial? *City*, 12(3), 303-320.

⁵ *Ibid*

cerdas juga mempromosikan praktik ramah lingkungan, seperti transportasi hijau dan bangunan berkelanjutan.⁶

4) *Smart Mobility.*

Smart mobility mencakup penggunaan teknologi untuk meningkatkan sistem transportasi kota. Ini melibatkan pengembangan transportasi umum yang terintegrasi dan efisien, seperti bus, kereta, dan sepeda sewa. Teknologi seperti aplikasi navigasi, sistem manajemen lalu lintas pintar, dan kendaraan otonom membantu mengurangi kemacetan, meningkatkan keamanan, dan membuat transportasi lebih nyaman. Selain itu, kota cerdas mendorong penggunaan kendaraan listrik dan infrastruktur pengisian daya.⁷

5) *Smart People.*

Smart people mengacu pada pengembangan masyarakat yang berpengetahuan dan terlibat secara aktif dalam kehidupan kota. Ini mencakup pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan, dan akses ke informasi. Teknologi digunakan untuk mendukung pendidikan online, platform pembelajaran sepanjang hayat, dan komunitas digital. Kota cerdas mendorong partisipasi aktif warga dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik melalui alat digital yang memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi.⁸

6) *Smart Living.*

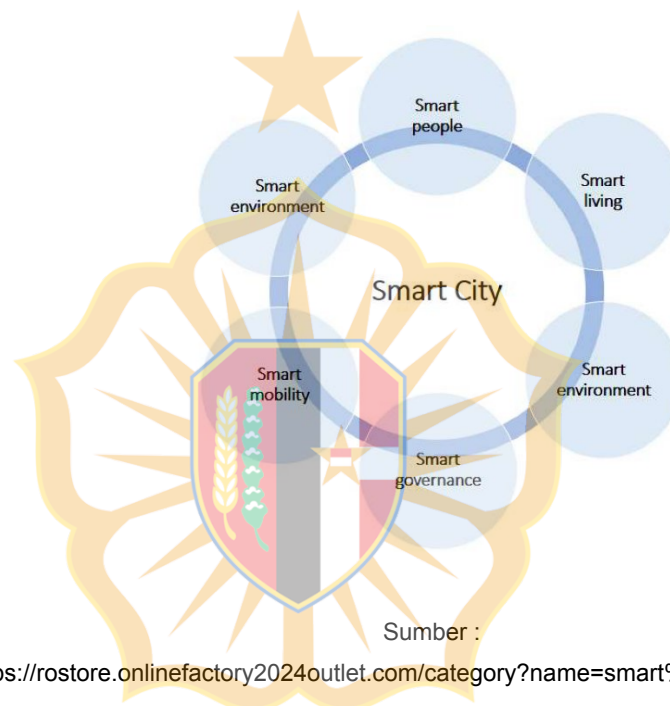
Smart living mencakup penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup warga kota. Ini mencakup layanan kesehatan yang lebih baik melalui telemedicine dan sistem

⁶ Nam, T., & Pardo, T. A. (2011). Conceptualizing Smart City with Dimensions of Technology, People, and Institutions. Proceedings of the 12th Annual International Digital Government Research Conference: Digital Government Innovation in Challenging Times, 282-291.

⁷ Ibid

⁸ Caragliu, A., Del Bo, C., & Nijkamp, P. (2011). Smart Cities in Europe. Journal of Urban Technology, 18(2), 65-82.

kesehatan yang terhubung, perumahan yang terjangkau dan aman, serta ruang publik yang dirancang untuk kenyamanan dan rekreasi. Teknologi juga digunakan untuk meningkatkan keamanan melalui sistem pemantauan dan respons darurat yang efisien. Selain itu, kota cerdas menawarkan berbagai layanan digital yang memudahkan kehidupan sehari-hari, seperti pembayaran digital, layanan pelanggan online, dan aplikasi komunitas.⁹



Gambar 01 : *Smart City Model*



b. Teori Keamanan Cerdas dan Kamtibmas

Teori Keamanan Cerdas (*Smart Security*) mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menciptakan sistem keamanan yang lebih efisien dan responsif. *Smart Security* bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang serba cepat. Disisi lain, masih terdapat kesenjangan digital dalam masyarakat

⁹ Ibid

sehingga mereka harus ditingkatkan secara bertahap dan terus-menerus agar mampu menjalani kehidupan yang era digital. Konsep ini sangat relevan dengan doktrin "Tata Tenteram Karta Raharja" yang diusung oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengacu pada empat elemen dasar keamanan: *security, surety, safety, dan peace*.¹⁰

1) *Security*

Security merujuk pada perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis. Dalam konteks Smart Security, ini dicapai melalui penggunaan teknologi seperti kamera pengawas, sensor, dan analisis data real-time yang memungkinkan deteksi dan pencegahan kejahatan secara lebih efektif. Sistem ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman, di mana warga merasa terlindungi dari ancaman fisik dan psikis.

2) *Surety*

Surety adalah perasaan bebas dari kekhawatiran. Dengan Smart Security, perasaan ini ditingkatkan melalui transparansi dan komunikasi yang lebih baik antara pihak berwenang dan masyarakat. Aplikasi keamanan dan sistem informasi yang memberikan pembaruan real-time tentang situasi keamanan lokal dapat membantu mengurangi kekhawatiran warga, membuat mereka merasa lebih tenang dan percaya diri.

3) *Safety*

Safety mengacu pada perasaan terlindungi dari segala bahaya. Teknologi dalam Smart Security, seperti sistem deteksi kebakaran dan sensor lingkungan, membantu melindungi masyarakat dari berbagai ancaman fisik. Selain itu, adanya sistem evakuasi otomatis dan peringatan dini juga meningkatkan tingkat keselamatan publik secara keseluruhan, memastikan warga terlindungi dari potensi bahaya.

¹⁰ Albino, V., Berardi, U., & Dangelico, R. M. (2015). Smart Cities: Definitions, Dimensions, Performance, and Initiatives. *Journal of Urban Technology*, 22(1), 3-21

4) Peace

Peace adalah perasaan damai lahiriah dan batiniah. Smart Security tidak hanya berfokus pada aspek fisik keamanan, tetapi juga pada menciptakan rasa damai dan ketenangan dalam masyarakat. Ini dapat dicapai melalui kolaborasi antara teknologi, pemerintah, dan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan aman, di mana warga merasa damai baik secara fisik maupun emosional.

Konsep Security, Surety, Safety & Peace dapat dijelaskan pada gambar berikut ini :



Sumber :

<https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.slideserve.com%2Fmikasi%2Fperanan-kelompok-peduli-keamanan-dalam-menjaga-kamtibmas>

Gambar 02 : *Security, Surety, Safety & Peace*

Smart security (Keamanan Cerdas) mencakup penggunaan teknologi canggih untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam

menjaga ketertiban serta melindungi masyarakat. Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) memegang peran penting dalam implementasi *smart security* di IKN Nusantara, dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam operasional mereka. Untuk memahami pentingnya smart security di IKN Nusantara, kita bisa menganalisis lingkungan strategis melalui **konsep Asta Gatra**, yang terdiri dari Trigatra dan Pancagatra:

Trigatra:

a) **Geografi:**

IKN Nusantara memerlukan keamanan wilayah geografis menjadi prioritas. Teknologi seperti CCTV berbasis AI, drone pemantau, dan sistem deteksi dini dapat digunakan untuk mengawasi dan merespon cepat terhadap ancaman.

b) **Sumber Kekayaan Alam:**

IKN Nusantara menjadi target ancaman, termasuk eksploitasi ilegal dan bencana alam. Polri dapat menggunakan sistem informasi geografis (GIS) dan sensor lingkungan untuk memantau dan melindungi sumber daya alam.

c) **Demografi:**

Dengan adanya perpindahan penduduk ke IKN, perubahan demografi perlu diantisipasi dengan baik. POLRI dapat menggunakan analitik data untuk memahami tren demografis dan mengembangkan strategi pengamanan yang adaptif.

Pancagatra:

a) **Ideologi:**

Stabilitas ideologi negara dapat terganggu oleh propaganda dan radikalisasi. Polri dapat menggunakan teknologi pemantauan media sosial untuk mendeteksi dan mengatasi propaganda ekstremis secara dini.

b) **Politik:**

Stabilitas politik sangat penting untuk keberlangsungan pembangunan IKN Nusantara. Polri dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk memantau situasi politik dan mengambil tindakan preventif terhadap potensi kerusuhan politik.

c) **Ekonomi:**

IKN Nusantara sebagai pusat ekonomi baru memerlukan perlindungan terhadap kejahatan ekonomi seperti penipuan dan pencucian uang. POLRI dapat menggunakan big data dan machine learning untuk mendeteksi pola kejahatan ekonomi dan mengambil tindakan yang diperlukan.

d) **Sosial dan Budaya:**

Perubahan sosial dan budaya di IKN Nusantara perlu diawasi agar tidak menimbulkan konflik. Polri dapat menggunakan analisis sentimen media sosial untuk memahami dinamika sosial dan mengidentifikasi potensi konflik sejak dini.

e) **Pertahanan dan Keamanan:**

Smart security adalah kunci dalam memastikan pertahanan dan keamanan di IKN Nusantara. Polri dapat mengintegrasikan berbagai sistem keamanan, termasuk sistem manajemen krisis berbasis teknologi, untuk merespons ancaman dengan lebih efektif, efisien, cepat dan tepat.

c. Teori Ketahanan Nasional

Teori ketahanan nasional menggambarkan kemampuan negara mempertahankan kedaulatan, integritas wilayah, dan kelangsungan hidup menghadapi ancaman, baik internal maupun eksternal. Ini melibatkan aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang saling terkait untuk menciptakan stabilitas dan kesejahteraan. Sosial budaya juga memegang peranan penting dalam ketahanan nasional. Kekuatan sosial budaya mencakup nilai-nilai, norma, dan identitas nasional yang kuat, serta keharmonisan sosial yang dapat mencegah konflik internal. Aspek ini juga mencakup pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat yang baik.

Dalam aspek pertahanan dan keamanan, ketahanan nasional melibatkan kesiapan militer yang memadai, sistem keamanan yang efektif, dan kemampuan untuk menghadapi ancaman militer maupun non-militer. Hal ini juga mencakup pengembangan teknologi pertahanan, kerjasama internasional dalam bidang keamanan, serta upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme, separatisme, dan kejahatan transnasional. Keseluruhan konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa negara mampu bertahan dan berkembang di tengah dinamika global yang cepat berubah, serta mampu mengatasi berbagai ancaman yang dapat mengganggu stabilitas dan keberlanjutan negara.¹¹

Konsepsi Ketahanan nasional meliputi aspek kehidupan nasional yang diupayakan dalam Astagatra terdiri dari Trigatra (aspek alamiah) dan pancagatra (aspek sosial), sebagaimana gambar berikut ini :

¹¹ Shakya, T. (1999). *The Dragon in the Land of Snows: A History of Modern Tibet Since 1947*. Columbia University Press.



Sumber :

<https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fslideplayer.inf>

Gambar 03 : Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia

10. Lingkungan Strategis

Perkembangan lingkungan strategis Indonesia terus berubah seiring dengan dinamika politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Pada skala global, pergeseran kekuatan ekonomi dari Barat ke Asia, ketegangan geopolitik, serta perkembangan teknologi disruptif seperti kecerdasan buatan dan teknologi informasi menjadi faktor dominan. Globalisasi dan perubahan iklim juga mempengaruhi stabilitas internasional, dengan peningkatan kerentanan terhadap bencana alam dan perubahan ekosistem.

Di tingkat regional, kawasan Asia Tenggara menghadapi tantangan seperti persaingan pengaruh antara negara-negara besar. ASEAN berupaya memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan melalui inisiatif seperti ASEAN Economic Community dan ASEAN Security Community. Namun, isu-isu seperti sengketa wilayah di Laut Cina Selatan dan masalah keamanan maritim tetap menjadi tantangan besar.

Secara nasional, Indonesia berupaya memperkuat ketahanan nasional melalui pembangunan ekonomi yang inklusif, peningkatan

kapabilitas pertahanan, dan stabilitas politik. Pemerintah mendorong infrastruktur dan digitalisasi untuk meningkatkan daya saing global. Selain itu, upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas pendidikan menjadi fokus untuk memperkuat fondasi sosial dan ekonomi. Tantangan seperti ketidakstabilan politik regional dan ancaman terorisme terus dihadapi dengan kebijakan strategis yang adaptif dan responsif.



Sumber :

<https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.slideshare.net>
%



Gambar 04 : Lingkungan Strategis

11. Fakta/Data

Dalam kaitan dengan membangun smart security guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di IKN Nusantara adalah : a) tingkat kesiapan yang masih rendah; b) sengketa lahan maupun c) potensi gangguan kamtibmas; d) keterbatasan akses masyarakat ke Otorita IKN; e) budaya dan kearifan lokal terganggu; maupun model pemerintahan asimetris di Otorita IKN.

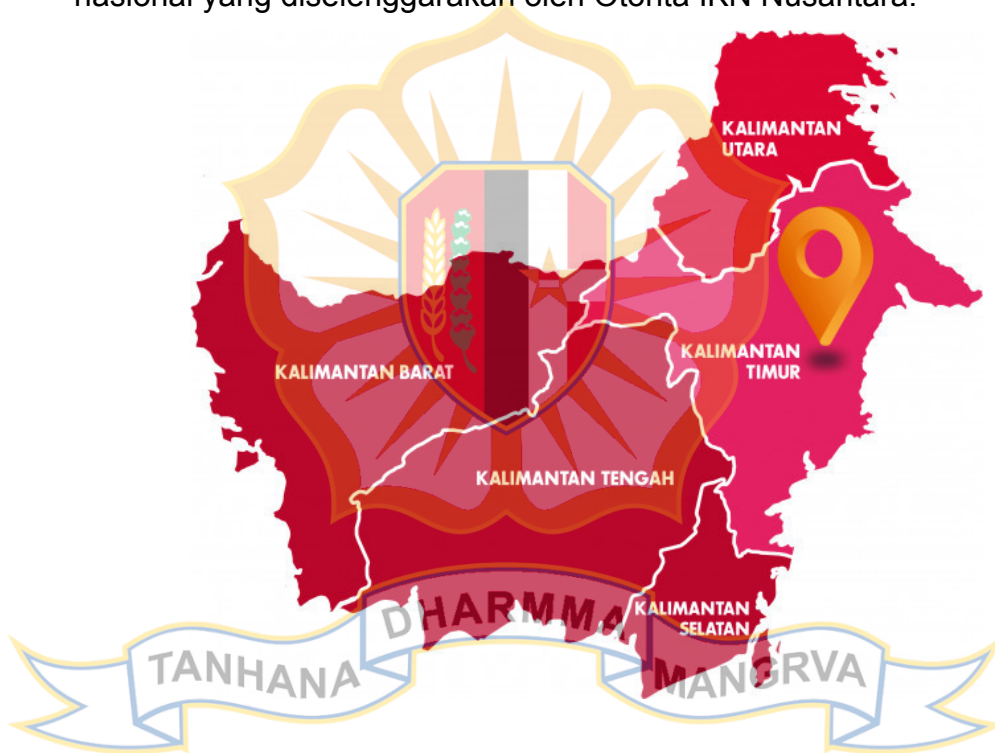
Tingkat kesiapan masih rendah sebagaimana penelitian Dewi, dkk (2020)¹² ditemukan bahwa masyarakat di Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Samboja dimana akan menjadi wilayah IKN Nusantara, mereka mempunyai tingkat kesiapan yang rendah dalam merespons/menanggapi akan adanya rencana pemindahan IKN. Mereka perlu mendapatkan sosialisasi yang benar dan massif oleh pemerintah pusat maupun Otorita IKN Nusantara. Disamping harus dipersiapkan, mereka harus juga ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya agar tidak tertinggal. Dimana ketertinggalan mereka akan menjadi residu dan persoalan pelik dimasa depan yang dapat mnggganggu jalannya pembangunan maupun mengganggu kondusivitas kamtibmas. Jika kondusivitas kamtibmas maka pembangunan tidak berjalan lancar dan ini menjadi kerawanan dan ancaman dimana kondusivitas, rasa aman pada pembangunan IKN Nusantara.

Sengketa lahan antara masyarakat setempat dengan Otorita IKN sering terjadi karena adanya pembayaran ganti rugi yang belum ada kesepakatan, sehingga memicu terjadinya gangguan kemanan seperti demonstrasi oleh masyarakat lokal. Menurut Agus Harimurti Yudhoyono masih ada sekitar 2.000 an Ha lahan yang belum diselesaikan ganti ruginya dan sedang dicarikan penyelesaian terbaik dan secepat-cepatnya.

Dalam menghadapi berbagai tantangan dan hambatan ini, sangat penting untuk merujuk pada analisis SWOT (Albert Humphrey) pengidentifikasian aspek SWOT tersebut yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dibahas tentang IKN Nusantara untuk memperoleh strategi yang maksimal dalam kekuatan dan peluang. Hambatan yang muncul perlu dikelola dengan baik melalui mitigasi dan solusi terbaik agar implementasi *Smart Security* di IKN Nusantara dapat direalisasikan secara efektif, efisien dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat, bangsa dan NKRI.

¹² Dewi, Maulida R. dkk. 2020. Analisis Kesiapan Masyarakat Kecamatan Sepaku dan Samboja Terhadap Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia, *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, Vo.16 No, 4, 2020. (<https://ejournal.undip.ac.id> diakses tanggal 3 Februari 2023, Jam 22.25 WIB).

Terkait dengan data *smart security* di IKN Nusantara masih dalam perencanaan yang sedang dikoordinasi dengan berbagai lintas Kementerian/Lembaga, TNI dan POLRI. Sifatnya data rahasia karena menyangkut keselamatan bangsa dan negara, terutama di IKN Nusantara. Penulis berkomunikasi dengan para pihak termasuk pejabat POLRI disampaikan bahwa data terkait IKN Nusantara dan data pengamanan adalah rahasia negara; sehingga penulis mencoba menemukan dan menggambarkan *smart security* di IKN Nusantara menggunakan berbagai presentasi-presentasi dari nara sumber yang membahas tentang sistem pertahanan dan keamanan berbasis *smart defence* dan *smart security* yang dibahas dalam seminar-seminar nasional yang diselenggarakan oleh Otorita IKN Nusantara.



Sumber :

[https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.niaga.asia%](https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.niaga.asia%2F)

Gambar 05 : Peta IKN Nusantara di Kec.Sepaku
Kab.Penajaman Paser Utara dan Kec. Samboja Kab.Kutai
Kartanegara Prov. Kalimantan Timur

Data pengguna *Hand Phone/computer* di Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Susenas 2019 sebesar 84,01 % dari total penduduk. Sementara itu di Kabupaten Kutai kartanegara mencapai 90,1% dari total penduduk. (BPS- Susenas 2019)

a. Peluang dikaitan dengan Kondisi saat ini.

Kemajuan Teknologi Ilmu Komunikasi (TIK) menjadi tantangan sekaligus peluang untuk melakukan transformasi dan berbagai lompatan yang signifikan untuk kemajuan bangsa dan negara. Kemajuan iptek satu sisi memberi manfaat namun disisi lain ada disrupsi yang harus dimitigasi, diantisipasi dan dicarikan solusi terbaik agar tidak ada yang tertinggal. Hal ini sesuai dengan salah satu dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.



Sumber :

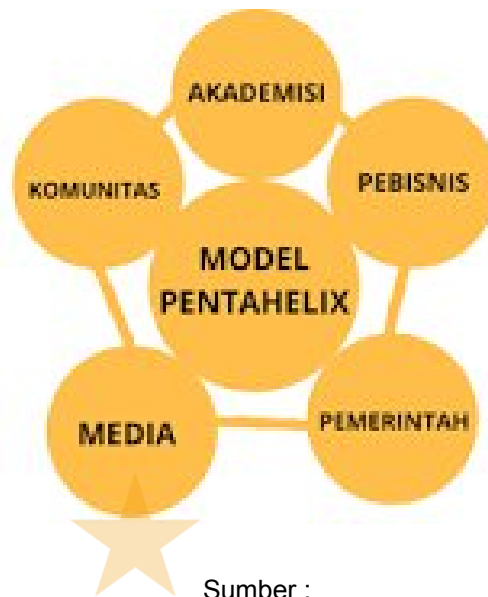
<https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.tribunnews>.

Gambar 06 : Tujuh Belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Ada 4 (empat) pilar dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), yaitu :

- 1) Pilar Pembangunan Sosial meliputi : Pembangunan tanpa kemiskinan (tujuan No.1) , tanpa kelaparan (tujuan No.2) , kehidupan sehat dan Sejahtera (tujuan No.3) , Pendidikan berkualitas (tujuan No.4) dan kesetaraan gender (tujuan No.5).
- 2) Pilar Pembangunan Ekonomi meliputi : energi bersih dan terjangkau (tujuan No.7) ; pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (tujuan No.8) ; industry, inovasi dan infrastruktur (tujuan No.9); berkurangnya kesenjangan (tujuan No.10).
- 3) Pilar Pembangunan Lingkungan meliputi : air bersih dan sanitasi layak (tujuan No.6) ; kota dan pemukiman yang berkelanjutan (tujuan No.11) ; dan konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab (tujuan No.12).
- 4) Pilar Tata kelola Pembangunan yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan Pembangunan berkelanjutan (tujuan No.17).

Dalam hal, *smart security*, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat tepat dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam membangun sistem pengamanan di IKN Nusantara berbasis kolaborasi *pentha helix*. Dimana para pemangku kepentingan (stake holder) baik pemerintah, perguruan tinggi, industry, masyarakat dan media berkomitmen dan bekerjasama untuk mewujudkan visi dan tujuan IKN Nusantara.



Sumber :

<https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdispar.ciamiskab.go.id>

Gambar 07 : Model Kolaborasi Pentahelix

b. Kendala-kendala yang dihadapi

Kendala-kendala yang dihadapi berkaitan dengan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*) dalam membangun *smart security* di IKN antara lain masih tingginya ketergantungan negara terhadap produk-produk dan aplikasi digital, sehingga dapat menimbulkan kerawanan manakala kita hanya beli alat saja, tanpa dipersiapkan SDM Talenta. Implementasi *smart city* di Indonesia sendiri mengalami berbagai kendala, mulai dari infrastruktur penunjang yang belum memadai, masih dalam tahap perencanaan, pemerintah setempat hingga masyarakat belum mampu memanfaatkan teknologi digital secara maksimal. Tantangannya sangat kompleks dan multidimensional antara lain menyangkut kepemimpinan dan polisi, pendanaan, kerjasama lintas sektor lintas daerah, ketersediaan teknologi, dukungan SDM, perubahan tata kelola dan birokrasi dari pusat hingga daerah, maupun manajemen dalam berinovasi. Dalam kaitan manajerial, masih perlu ditingkatkan faktor-faktor *man, money, material, method, machine, marketing dan minutes (time)* secara komprehensif dan integral.

BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum

Membangun Kota Cerdas (*smart city*) IKN Nusantara merupakan pengalaman pertama bagi Pemerintah Indonesia, dimana tantangannya tidak mudah, sehingga membutuhkan komitmen pemerintah yang didukung semua pihak berbasis pentahelix agar hajatan nasional ini sukses demi kepentingan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam membangun *smart city* setidaknya ada 6 (enam) pilar yang harus dikembangkan yaitu :

- a. *Smart Governance*, merujuk pada penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi dalam proses pemerintahan. Ini mencakup *e-government* (pemerintahan elektronik), yang memungkinkan warga untuk mengakses layanan publik secara online, memberikan umpan balik, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.¹³
- b. *Smart Economy*, mencakup penggunaan teknologi untuk mendukung inovasi, kewirausahaan, dan pertumbuhan ekonomi. Ini melibatkan pengembangan ekosistem digital yang mendorong start-up dan bisnis berbasis teknologi (*e-commerce*) dan layanan keuangan digital.¹⁴
- c. *Smart Environment*, berfokus pada penggunaan teknologi untuk melindungi dan menjaga lingkungan. Kota cerdas juga mempromosikan praktik ramah lingkungan, seperti transportasi hijau dan bangunan berkelanjutan.¹⁵
- d. *Smart Mobility*, mencakup penggunaan teknologi untuk meningkatkan sistem transportasi kota. Ini melibatkan pengembangan transportasi

¹³ Hollands, R. G. (2008). Will the real smart city please stand up? Intelligent, progressive or entrepreneurial? *City*, 12(3), 303-320.

¹⁴ Ibid

¹⁵ Nam, T., & Pardo, T. A. (2011). Conceptualizing Smart City with Dimensions of Technology, People, and Institutions. *Proceedings of the 12th Annual International Digital Government Research Conference: Digital Government Innovation in Challenging Times*, 282-291.

umum yang terintegrasi dan efisien, seperti bus, kereta, dan sepeda sewa. Selain itu, kota cerdas mendorong penggunaan kendaraan listrik dan infrastruktur pengisian daya.¹⁶

- e. *Smart People*, mengacu pada pengembangan masyarakat yang berpengetahuan dan terlibat secara aktif dalam kehidupan kota. Ini mencakup pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan, dan akses ke informasi. Kota cerdas mendorong partisipasi aktif warga dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik melalui alat digital yang memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi.¹⁷
- f. *Smart Living*, mencakup penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup warga kota. Ini mencakup layanan kesehatan yang lebih baik melalui telemedicine dan sistem kesehatan yang terhubung, perumahan yang terjangkau dan aman, serta ruang publik yang dirancang untuk kenyamanan dan rekreasi. Teknologi juga digunakan untuk meningkatkan keamanan melalui sistem pemantauan dan respons darurat yang efisien. Selain itu, kota cerdas menawarkan berbagai layanan digital yang memudahkan kehidupan sehari-hari, seperti pembayaran digital, layanan pelanggan online, dan aplikasi komunitas.¹⁸

Membangun kota cerdas, didalamnya juga harus membangun keamanan cerdas (*smart security*) di kota besar membutuhkan pengelolaan sumber daya nasional secara cermat dan benar berbasis pada kemampuan sendiri guna memperoleh tujuan nasional. Pendekatan manfaat sangat diperlukan untuk membahas pertanyaan-pertanyaan kajian yang dituangkan dalam sub-sub bab, kemudian analisisnya menggunakan *SWOT Analysis*. Kondisi saat ini mengenai *smart security* masih dalam tahap perencanaan, dimana progress dari pembangunan fisik sedang dipacu untuk mengejar target Upacara kenegaraan dalam rangka HUT ke-79 Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2045.

¹⁶ Ibid

¹⁷ Caragliu, A., Del Bo, C., & Nijkamp, P. (2011). Smart Cities in Europe. *Journal of Urban Technology*, 18(2), 65-82.

¹⁸ Ibid

SWOT Analysis dikemukakan pertama kali oleh Albert S. Humphrey¹⁹ merupakan perencanaan strategi yang dilakukan dengan cara identifikasi terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam suatu organisasi/institusi guna memecahkan permasalahan maupun menentukan strategi dalam mencapai tujuan. Identifikasi secara mendalam atas keempat faktor tersebut, dimana faktor kekuatan maupun kelemahan berasal dari internal IKN Nusantara dan faktor peluang maupun ancaman berasal dari eksternal IKN Nusantara, sehingga deman cermat diketahui posisinya lalu dapat dilakukan pengembangan lebih lanjut demi mencapai tujuan.

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai konsep *smart security* guna mewujudkan kamtibmas di IKN, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman membangun *smart security*, dampak *smart security* dan upaya-upaya yang dilakukan dalam membangun *smart security* dan hasil analisis.

13. Konsep *Smart Security* Guna Mewujudkan Kamtibmas di IKN Nusantara, Penyajian Data dan Pembahasan

Data dan pembahasan dalam Taskap ini mengacu pada *research gap* (kesenjangan penelitian) yang dirumuskan menjadi permasalahan yang dijabarkan dalam pertanyaan-pertanyaan kajian, kemudian dianalisis menggunakan *SWOT Analysis* dalam pembahasannya.

- a. Konsep *Smart Security*, hambatan dan tantangannya guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di IKN
Konsep *smart security* yang dikembangkan guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di IKN adalah pemolisian masyarakat yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang dikenal dengan teknologi digital. Pada

¹⁹ <https://www.gramedia.com/best-seller/analisa-swot/> (diakses tanggal 2 Mei 2024. Jam 16.00).

pelaksanaannya bukan hanya sekedar membeli peralatan-peralatan berbasis teknologi Informatika dan komunikasi digital, namun lebih dari itu **harus dimulai dari membangun SDM Talenta** yang akan mengelola sistem keamanan cerdas (*smart security*). Mereka harus direkrut dari sekarang, kemudian dilatih di pusat-pusat penelitian di luar negeri, tempat dimana peralatan digital akan dibeli. Kemudian kembali ke tanah air untuk menjadi Tim Keamanan Cerdas di IKN Nusantara. Diperlukan pusat pengendalian digital dimana akan dikoordinasikan oleh Perwira Tinggi/Eselon I, sehingga memudahkan koordinasi guna membangun sinergi dengan semua pemangku kepentingan (*stake holders*) baik pemerintah, akademisi, industri, masyarakat dan media (kolaborasi *pentha helix*).

Semestinya, membangun kota baru relatif lebih mudah dibandingkan merenovasi kota yang sudah ada, karena kompleksitas permasalahannya lebih rumit dan multi dimensional. Misalnya menyangkut memindahkan penduduk, ganti untung dan lain-lain saat mempersiapkan lahan/lokasi, berpotensi menimbulkan gesekan dan konflik antara satu dengan lainnya. Untuk mengetahui hambatan dan tantangan dalam membangun *smart security* guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di IKN Nusantara, akan dianalisis menggunakan *SWOT Analysis*, sehingga diketahui kekuatan (*Strenght*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*) dan hambatan (*Threats*). Fakta dan data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan *SWOT Analysis* sedemikian rupa, sehingga menghasilkan strategi yang tepat.

		faktor external	
		O <i>opportunity</i> (peluang)	T <i>threat</i> (ancaman)
faktor internal	S <i>strenght</i> (kekuatan)	S-O strategy memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang	S-T strategy mengerahkan kekuatan untuk mengantisipasi ancaman
	W <i>weakness</i> (kelemahan)	W-O strategy meminimalisir kelemahan untuk meraih peluang	W-T strategy meminimalisir kelemahan untuk mengantisipasi ancaman

Sumber : www.repository.dinus.ac.id/SWOT.pptx

Gambar 08 : Matriks Analisis SWOT

Data mengenai potensi hambatan dalam membangun Keamanan Cerdas (*smart security*) di IKN Nusantara, antara lain :

- 1) Masyarakat di Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Samboja dimana akan menjadi wilayah IKN, mereka mempunyai tingkat kesiapan yang rendah dalam merespons/menanggapi akan adanya rencana pemindahan IKN.

Ini terjadi akibat dari tingkat literasi, kapasitas dan kapabiitasnya tidak memadai untuk dapat mengakses Rencana pembangunan dan pemindahan di IKN Nusantara. Jangankan memikirkan mega proyek IKN, untuk memenuhi hidup sehari-ari mereka harus banting tulang dan kerja sangat keras. Di IKN Nusantara, masyarakat lokal masih menghadapi ketertinggalan dalam hal kualitas dan kapasitas dibandingkan dengan pendatang dari pemerintahan pusat Jakarta dan keluarganya. Berdasarkan data BPS tahun 2022, sebagian besar menjadi petani kelapa sawit, karet, padi, dan palawija Sektor tambang dan migas di wilayah ini justru dieksplorasi oleh pihak asing dan PERTAMINA. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat lokal masih relatif rendah

dibandingkan dengan masyarakat pendatang baru, sehingga tingkat literasi dan akses ke IKN kurang memadai.

2) Sengketa lahan

Ada seluas 2.086 hektar lahan yang masih bersengketa dimana masyarakat lokal telah menempati lahan tersebut puluhan tahun lamanya, sehingga harus diselesaikan dengan benar sesuai peraturan yang berlaku.²⁰ Hal tersebut harus diselesaikan secara adil seperti ganti untung, penanganan dampak sosial bagi yang terdampak secara terintegrasi dengan semua Kementerian/Lembaga yang terkait. Jika tidak diselesaikan segera, berpotensi memicu konflik yang berkepanjangan dan akan mengganggu proses pembangunan IKN Nusantara.

3) Gangguan kamtibmas.

Pergeseran *centre of gravity* dari Jakarta ke Nusantara menjadi daya tarik masyarakat dimana mereka berbondong-bondong mengadu nasib di wilayah pemerintahan pusat. Kehadiran mereka yang ingin mengadu nasib di IKN tidak dapat dibiarkan, namun perlu dikendalikan sedemikian rupa agar mereka tidak menjadi kelompok miskin perkotaan. Sehingga mereka perlu mendapatkan program pemberdayaan masyarakat.

4) Keterbatasan akses masyarakat lokal ke IKN berpotensi menimbulkan konflik akibat dari mereka tidak memiliki daya (kapasitas dan kualitas), sehingga kesenjangan sosial ekonomi semakin melebar. Oleh karena itu, kondisi ketertinggalan mereka akan menjadi residu dan persoalan pelik dimasa depan yang dapat mnggganggu jalannya pembangunan maupun mengganggu kondusivitas kamtibmas. Harus disiapkan *affirmative policy* (kebijakan keberpihakan) kepada mereka agar tidak menjadi masalah sosial baru yang dapat mengganggu proses pembangunan IKN Nusantara.

²⁰ <https://nasional.kompas.com/read/2024/04/03/15490571/ribuan-hektar-lahan-ikn-bersengketa-ahy-aturan-harus-tegak-tak-boleh-ada>.

5) Budaya dan kearifan lokal terganggu

Salah satu budaya & kearifan lokal masyarakat Mentawir, Paser dan Balik di Kecamatan Sepaku adalah "*lati tuo*" atau hutan tua. Dimana mereka tidak sembarangan menebang hutan. Ada tradisi musyawarah jika akan menebang hutan dan jika sudah disepakati mereka akan mengadakan Ritual Adat Bersoyong sebuah ritual untuk meminta izin mengambil hasil alam kepada leluhur. Mereka percaya musibah dan bencana akan hadir ketika tidak melakukan rangkaian ritual tersebut. Kekhawatiran muncul ketika IKN akan mendegradasi budaya lokal.²¹

6) Model sistem pemerintahan asimetris di OIKN

Sistem pemerintahan asimetris dimana antara pemerintahan satu daerah dengan pemerintahan daerah lainnya di wilayah Indonesia terdapat adanya perbedaan dapat memicu konflik manakala para pihak tidak memahami dan memiliki komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan dalam keberagaman dalam satu bingkai Bhinneka Tungga Ika.

Potensi hambatan-hambatan tersebut harus dimitigasi sedemikian rupa untuk mencari solusi terbaik sekaligus mempersiapkan sumber daya yang memadai untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam pembangunan dan pemindahan IKN Nusantara.

Tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi, antara lain²² :

- 1) Sinkronisasi kepentingan politik dan kepentingan teknis dalam membangun IKN Nusantara.
- 2) Sinkronisasi dan konsolidasi ratusan paket-paket pekerjaan fisik dalam waktu yang bersamaan, ada yang kontrak konvensional

²¹ <https://www.mongabay.co.id/2023/07/01/kala-ikn-datang-masyarakat-adat-was-was-tradisi-bakal-hilang/>

²² <https://www.itb.ac.id/berita/tantangan-megaprojek-ikn-mulai-dari-teknologi-hingga-sosial-ekonomi-sudah-siapkah-kita/58979>

dimana kontrak disain dan implementasinya berbeda dan ada yang disain dan implementasinya dalam satu kontrak.

- 3) Implementasi teknologi konstruksi yang ramah lingkungan (*clean construction*) dengan pemanfaatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDM) yang maksimal.
- 4) Rantai pasok (*supply chain*) yang efektif dan memaksimalkan sumber lokal dan TKDM
- 5) *Creative financing* untuk penguatan anggaran non-APBN (biaya dari APBN hanya 19%)
- 6) Integrasi pembangunan multi sektor yang dilakukan serentak dalam target waktu yang bersamaan.
- 7) *Dashboard* pemantauan digital pembangunan fisik di IKN yang mengintegrasikan sistem perencanaan, implementasi dan evaluasi yang integratif.
- 8) Penjaminan keberlanjutan atas pembangunan IKN yang membutuhkan anggaran besar, dimana pergantian kepemimpinan nasional dapat mengubah kebijakan baru.
- 9) Model pembangunan dan manajemen sektoral IKN menjadi *role model* bagi pemerintah daerah lainnya.
- 10) Mewujudkan 8 prinsip pembangunan IKN yaitu : a) *In harmony with nature*; b) *Unity in diversity*; c) *Connected active and accessible*; d) *Low carbon emission*; e) *Circular and resilient*; f) *Safe and affordable*; g) *Liveable and efficient through technology*; and h) *Robust economic opportunity for all*.²³

Lebih lanjut, pembahasan menggunakan *SWOT Analysis* dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Identifikasi Kekuatan (S) dan Kelemahan (W)

Faktor internal yang berupa Kekuatan diidentifikasi secara cermat oleh tim yang profesional dan berpengalaman, antara lain untuk menemukan keunggulan sebagai kekuatan dari organisasi/institusi sebagai *success story* yang luar

²³ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5210170/5-tantangan-bangun-hunian-di-ikn-nusantara>

biasa, yang terbukti memenangkan kompetisi; misalnya SDM Talenta yang loyal dan berdaya saing. Sedangkan kelemahan merupakan sesuatu yang menjadikan kegagalan, tidak optimal dan tidak kompetitif; misalnya gagal melakukan tranformasi digital.

Faktor-faktor yang menjadi kekuatan di IKN adalah :

- a) Regulasi utama yang berlaku
- b) Lokasi Indocentris
- c) *Pembangunan* fisik sudah dimulai
- d) *Janji Kampanye* Presiden Terpilih melanjutkan pembangunan IKN Nusantara
- e) Dukungan kuat dari rakyat Kaltim

Adapun faktor-faktor yang menjadi kelemahannya adalah :

- a) Dukungan APBN Terbatas
- b) Kondisi ekonomi nasional belum pulih pasca pandemi covid 19
- c) Motif kepentingan tertentu
- d) Pembahasan RUU IKN sangat singkat
- e) Rawan ancaman dari Luar Negeri

2) Identifikasi Peluang (O) dan Ancaman (T)

Faktor eksternal yang berupa Peluang (Opportunity) dan Hambatan (Threats) diidentifikasi secara cermat oleh tim yang profesional dan berpengalaman, antara lain untuk menemukan *positioning* organisasi/institusi kita dihadapkan dengan para kompetitor. Peluang merujuk pada situasi atau kondisi yang memberikan kesempatan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan atau menguntungkan. Peluang adalah suatu hal yang dapat ditemui atau diciptakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bisnis, pendidikan, karier, dan kehidupan pribadi. peluang seringkali datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kemudian, memiliki

kemampuan untuk mengenali, mengevaluasi, dan memanfaatkan keterampilan yang sangat berharga.

Peluang akan tercipta manakala para kompetitor tidak memiliki daya saing kuat, hal ini akan menjadi peluang bagi yang memiliki keunggulan kompetitif untuk memenangkan kompetisi.

Ancaman merupakan usaha yang dilakukan pada individu, kelompok tertentu ataupun negara yang dapat berdampak buruk pada keselamatan individu, kelompok tertentu ataupun negara. Ancaman bertujuan untuk memengaruhi sebuah tatanan yang awalnya damai menjadi rusak atau hancur. Karena itu, perlu adanya persatuan dan kesatuan untuk mengatasi ancaman yang diterima tersebut.

Secara umum ancaman dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu : a) Ancaman Militer merupakan jenis ancaman yang dilakukan dengan kekuatan senjata dan terorganisir. Ancaman ini akan membahayakan kedaulatan negara, keselamatan segenap bangsa dan keutuhan wilayah. Beberapa contoh ancaman militer adalah sebagai berikut: Munculnya terorisme yang dilakukan oleh kelompok tertentu; Terjadinya pelanggaran wilayah oleh negara tetangga, Malaysia pada daerah perbatasan tepatnya di Ambalat; Pelanggaran wilayah oleh Timor Leste pada pulau Batik; Berdirinya kelompok HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang dapat mengancam ideologi negara Indonesia dan lain-lain.; b) Ancaman Non-Militer, merupakan ancaman yang tidak menggunakan senjata, namun sifatnya tidak dapat terlihat secara fisik. Meskipun tak kasat mata, ancaman non militer tetap dapat membahayakan bagi siapapun. Berikut contohnya: Meningkatnya kemiskinan dan pengangguran di daerah tertentu, sehingga tingkat kriminalitas juga cukup tinggi; Ancaman terhadap kesejahteraan sosial karena tidak meratanya pembangunan infrastruktur; Kualitas SDM yang rendah karena mahalnya Pendidikan; dan Ancaman

ketertinggalan pada teknologi karena tidak mengikuti zaman, dan mudah mempercayai hoaks.

Faktor-faktor yang menjadi Peluang dalam membangun IKN Nusantara, antara lain :

- a) Pemerataan pembangunan nasional
- b) Pemanfaatan bonus demografi
- c) Penyiapan Indonesia Emas Th 2045
- d) Pemanfaatan Teknolofi Informasi dan Komunikasi
- e) Kerjasama kemitraan *pentha helix*

Dan faktor-faktor Ancamannya antara lain :

- a) Lokasi berbatasan darat dengan Malaysia
- b) Lokasi dekat Aluar Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II
- c) Penyusupan teknologi penyadapan oleh Investor Asing
- d) Eskalasi konflik Laut China Selatan
- e) Dinamika geopolitik global yang tidak menentu arahnya

Kemudian, dari data-data tersebut dianalisis menggunakan *SWOT Analysis* yang dilakukan secara sistematis serangkaian perhitungan, yaitu : a) *Internal Factor Analysis Strategy (IFAS)*; *External Factor Analysis Strategy (EFAS)*; dan *Strategy Factor Analysis Summary (SFAS)* menggunakan perhitungan nilai, bobot dan *rating* tertentu.²⁴

3) Perhitungan IFAS

Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan analisis IFAS:

- a) Penentuan lima aspek *strength* dan *weakness* yang terdapat di tabel IFAS.
- b) Menentukan bobot yang totalnya tidak boleh lebih dari satu.

²⁴ Rangkuti, Freddy. (2009). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta : Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama

- c) Penentuan rating satu sampai lima skor rendah dan enam sampai dengan sepuluh skor tertinggi.
- d) Pengkalian bobot dan rating akan memperoleh hasil pembobotan.
- e) Penjumlahan akan memberikan cerminan faktor strategis dari dalam perusahaan tersebut.

Dengan cara ini, analisis IFAS membantu dalam mengidentifikasi posisi strategis perusahaan berdasarkan pada kekuatan dan kelemahan internalnya.

SWOT Analysis – Perhitungan IFAS, tersebut dalam matriks berikut ini :

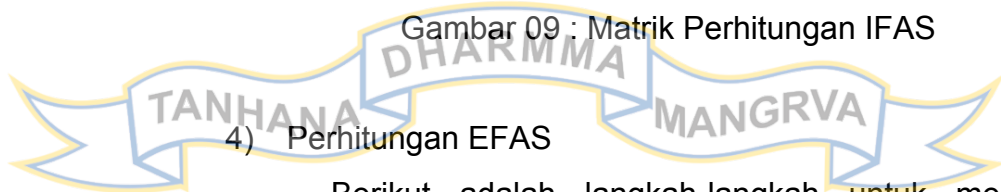
Matriks *SWOT Analysis* – Perhitungan IFAS

Faktor Strategi Internal	Bobot	Rating	Skor
Kekuatan	-		
Regulasi utama sudah ada	0,110	9	0,990
Lokasi Indocentris	0,095	9	0,855
Pembangunan fisik sudah dimulai	0,095	8	0,855
Komitmen Presiden Terpilih	0,110	9	0,990
Dukungan kuat dari rakyat Kaltim	0,090	8	0,720

Kelemahan			
Kondisi ekonomi nasional belum pulih	0,110	1	0.110
Dukungan APBN Terbatas	0,100	2	0.200
Motif kepentingan tertentu	0,090	1	0,090
Pembahasan RUU IKN sangat singkat	0,090	1	0,090
Rawan ancaman dari Luar Negeri	0,110	1	0,110
Total :	1.00	-	5,010

Sumber : Data diolah (Penulis,2024)

Gambar 09 : Matrik Perhitungan IFAS



4) Perhitungan EFAS

Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan analisis EFAS:

1. Identifikasi Faktor Peluang dan Ancaman:

- o Masukkan lima faktor peluang dan lima faktor ancaman ke dalam Tabel EFAS.

2. Penentuan Bobot:

- o Tetapkan bobot untuk setiap faktor strategis dalam skala 1,0 hingga 0,0, berdasarkan

dampaknya terhadap keseluruhan strategi. Total bobot tidak boleh melebihi 1,00.

3. Penilaian Rating:

- Berikan nilai rating untuk setiap faktor dalam skala 10 hingga 1, berdasarkan pengaruhnya terhadap situasi yang sedang dianalisis. Faktor peluang diberi nilai tinggi (6-10) jika lebih kuat dari rata-rata pesaing, sedangkan faktor ancaman diberi nilai rendah (1-5) jika lebih lemah dari rata-rata pesaing.

4. Perhitungan Skor Pembobotan:

- Pengkalian bobot dan rating menghasilkan tingkat signifikansi masing-masing faktor.

SWOT Analysis – Perhitungan EFAS, tersebut dalam matriks berikut ini :

Matriks SWOT Analysis – Perhitungan EFAS

Faktor Strategi Eksternal	Bobot	Rating	Skor
Peluang			
Pemerataan pembangunan nasional	0,110	9	0,990
Pemanfaatan Bonus Demografi	0,095	9	0,855
Penyiapan Indonesia Emas 2045	0,095	8	0,855
Pemanfaatan			

Teknologi Informasi & Komunikasi	0,110	9	0,990
Kerjasama kemitraan <i>pentha helix</i>	0,090	8	0,720

Ancaman			
Lokasi berbatasan darat dengan Malaysia	0,100	1	0.100
Lokasi dekat dengan ALKI II	0,100	1	0.110
Penyusupan teknologi penyiapan oleh investor asing	0,110	1	0,110
Eskalasi konflik Laut China Selatan	0,090	2	0,180
Dinamika geopolitik global yang tidak menentu arahnya	0,110	1	0,110
Total :	1.00	-	5,020

Sumber : Data diolah (Penulis,2024)

Gambar 10 : Matrik Perhitungan EFAS

5) Perhitungan SFAS

Strategic Factor Analysis Summary (SFAS) adalah ringkasan dari faktor strategis organisasi/ Perusahaan/ institusi yang merupakan gabungan dari IFAS dan EFAS masing-masing sepuluh faktor strategis.

Tahapan dalam Menyusun SFAS adalah :

a) Identifikasi Faktor Paling Penting:

- Penentuan yang paling signifikan (dengan skor terbesar) dari matriks IFAS dan EFAS.

b) Penetapan Bobot:

- Penentuan bobot dalam pengindikasian faktor paling penting dengan totalnya tidak boleh lebih dari satu.

c) Pemberian Rating:

- Kolom ketiga skala yang digunakan untuk menentukann respons faktor strategis adalah empat sampai dengan satu yang menunjukkan sangat baik hingga sangat buruk.

d) Perhitungan Skor Tertimbang:

- Pengkalian kolom kedua dan ketiga menghasilkan skor tertimbang.

e) Penentuan Durasi Waktu Implementasi:

- Kolom kelima menunjukkan waktu yang dibutuhkan untuk pengimplementasian strategi.

Dengan menggunakan langkah-langkah ini, analisis strategis membantu perusahaan dalam mengidentifikasi, mengevaluasi dan merespons strategi.

Matrik SWOT Analysis - SFAS

Faktor Strategis	Bobot	Rating	Skor	Durasi Kebijakan
Regulasi utama sudah ada	0.100	4	0,400	Jangka Panjang
Komitmen Presiden Terpilih	0.200	4	0,800	Jangka menengah
Lokasi Indocentris	0,200	4	0,800	Jangka Panjang
Kondisi ekonomi belum pulih	0.100	3	0,300	Jangka pendek
Rawan Ancaman Luar Negeri	0,125	4	0,500	Jangka Panjang

Pemerataan Pembangunan nasional	0,060	3	0,180	Jangka panjang
Penyiapan Indonesia Emas 2045	0,080	4	0,320	Jangka menengah
Pemanfaatan T.I.K.	0,060	4	0,320	Jangka panjang
Dinamika geopolitik	0,100	4	0,400	Jangka

yg tidak menentu arahnya				panjang
Penyusupan teknologi penyadapan oleh investor asing	0,095	4	0,380	Jangka panjang
TOTAL	1.00	-	-	-

Sumber : Data diolah (Penulis,2024)

Gambar 11 : Matrik Perhitungan SFAS

Dari *SWOT Analysis* yang meliputi IFAS, EFAS dan SFAS akan diperoleh *Grand strategy*.

Strategi merupakan rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran tertentu (KKBI). Untuk itu diperlukan metode atau teknik tertentu sehingga kebijakan yang dihasilkan, akan optimal dalam rangka mencapaitujuan organisasi. Pengertian teori Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada umumnya orang sering kali mencampuradukkan ke dua kata tersebut. Seiring dengan perkembang ilmu pengetahuan dewasa ini, para ahli manajemen mendefinisikan

manajemen strategi sebagai seperangkat keputusan-keputusan dan tindakan manajerial yang harus diambil oleh sebuah organisasi atau perusahaan untuk mencapai kinerja puncak atau tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi harus dikelola sedemikian rupa, dimana proses manajemen strategis merupakan pendekatan yang obyektif, logis dan sistematis untuk membuat keputusan besar dalam mengoptimalkan peran Lembaga Penyiaran Publik di perbatasan. Proses ini berusaha untuk mengorganisir berbagai informasi kualitatif dan kuantitatif dengan cara yang memungkinkan keputusan efektif diambil dalam kondisi yang tidak menentu. Berdasarkan pada pengalaman, penilaian dan intuisi, maka strategi meningkatkan dan mengoptimalkan peran Lembaga Penyiaran Publik di perbatasan yang dirumuskan dapat diimplementasikan dengan baik dan tepat sasaran. Kegiatan yang paling penting dalam formulasi strategi melalui proses manajemen adalah memahami seluruh informasi yang terdapat pada sebuah organisasi secara komprehensif dan dari multi perspektif, menganalisis situasi untuk mengetahui isu-isu apa yang terjadi disekitar organisasi, dan memutuskan tindakan apa yang harus segera dilakukan oleh organisasi tersebut. 10 Formulasi strategi yang dilakukan menjadi akurat dan bermanfaat serta tepat diimplementasikan ketika formulator memperhatikan lingkungan stratejik, berbagai peluang dan kendala yang dimiliki dan mempengaruhi eksistensi organisasi.

Grand strategy yang diperoleh dari *SWOT Analysis* : IFAS, EFAS dan SFAS, digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Rangkuti (2018)

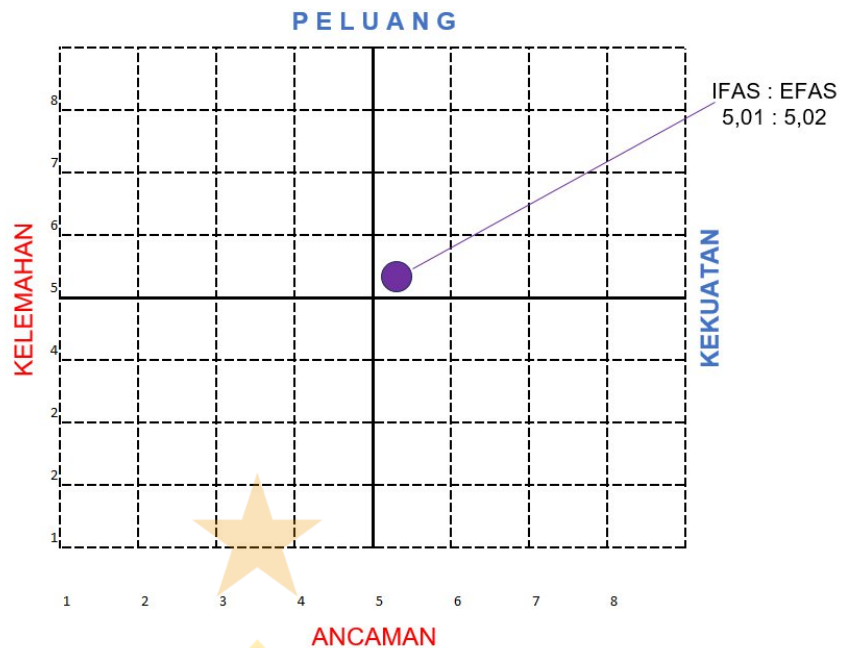
Gambar 12 : Matrik *Grand Strategy* dari *SWOT Analysis*

Dari gambar tersebut dijelaskan bahwa :

- a. Kuadran I menggambarkan strategi S-O (*Strengt-Opportunity*) mendukung strategi agresif dengan cara memanfaatkan kekuaktan untuk mendapatkan peluang yang ada.
- b. Kuadran II menggambarkan strategi O-W (*Opportunity-Weakness*) mendukung strategi turn around dengan cara memanfaatkan peluang untuk meminimalisir kelemahan.
- c. Kuadran III menggambarkan strategi W-T (*Weakness-Treats*) mendukung strategi defensif mempertahankan strategi yang dijalankan saat ini untuk mempertahankan proses bisnis.
- d. Kuadran IV menggambarkan strategi S-T (*Strengt-Treats*) mendukung strategi diversifikasi pemanfaatan maksimal kekuatan dalam mengatasi ancaman.

Dalam Taskap ini, *Grand Strategy* dari analisis IFAS dengan skor 5,01 dan EFAS dengan skor 5,02 berada pada kuadran I dimana stretagi yang akan dilakukan adalah Strategi Agresif.

Grand strategy tersebut digambarkan dalam matriks sebagai berikut :



Sumber : Diolah (Penulis,2024)

Gambar 13 : Matriks *Grand Strategy* dari Hasil analisis

SWOT

SWOT Analysis merupakan alat (*tool*) yang digunakan dalam manajemen strategi yang meliputi tahapan-tahapan :

a. Evaluasi Lingkungan

Hal ini dilakukan untuk menganalisa faktor strategis dari dalam dan dari luar. Tahapan ini merupakan bagian krusial karena lingkungan cenderung bersifat dinamis.

b. Perancangan Strategi

Perancangan strategi adalah proses merumuskan tindakan berdasarkan hasil evaluasi lingkungan. Ini diperlukan untuk melakukan perubahan yang bertujuan meningkatkan keuntungan, dengan mempertimbangkan kebutuhan perusahaan saat ini dari faktor internal dan eksternal.

c. Penerapan Strategi

Penerapan strategi melibatkan pelaksanaan tindakan yang direncanakan setelah perencanaan strategi disusun. Hal ini membantu perusahaan mengatasi hambatan dan

memanfaatkan peluang pengembangan usaha, berdasarkan pada perencanaan strategis dan faktor-faktor lingkungan.

d. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen pengembangan usaha, di mana strategi yang telah diterapkan dinilai. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah strategi yang sedang berjalan perlu dipertahankan, diubah, atau digantikan dengan strategi lain, berdasarkan kondisi lingkungan saat itu.

Dengan langkah-langkah ini, organisasi/institusi/perusahaan dapat secara efektif mengelola strategi mereka untuk mencapai tujuannya dan merespons perubahan lingkungan dengan tepat.

Berdasarkan hasil *SWOT Analisis* tersebut, dimana strateginya agresif harus dilakukan dengan memaksimalkan kekuatan untuk memperoleh peluang-peluang yang menguntungkan.

Dalam hal ini konsep *smart security* yang dibangun guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di IKN Nusantara adalah **pemolisian dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi** (atau yang dikenal dengan teknologi digital), dilakukan secara terintegrasi dengan *smart city system* yang sedang dibangun di IKN Nusantara.

14. Dampak *Smart Security* terhadap Kamtibmas di IKN Nusantara

Transformasi teknologi digital berlangsung sangat cepat dan susah diprediksi kemana arahnya. Satu sisi, ada dampak positif namun disisi lain ada dampak negatifnya. Dampak positifnya antara lain efisiensi, kenyamanan, keselamatan, lingkungan yang tertib dan sebagainya. Dampak negatifnya antara lain mengganggu privasi, ketergantungan pada teknologi, pengangguran, masalah etika, dan sebagainya. Penerapan konsep *intelligent city* sebagai wujud pengembangan *smart city* akan

mendorong percepatan modernisasi kota melalui pemanfaatan teknologi sebagai dasar pengembangan konsep ini. Peran teknologi inilah yang akan menjadi kunci keberhasilan dari penyelenggaraan konsep *intelligent city*. Didukung dengan peran dalam mentransformasikan komunitas yang lebih kreatif dan aktif dalam berbagai proyek pengembangan *smart community*, dapat mendorong terciptanya kota yang saling terkoneksi dengan peran teknologi di dalamnya. Bagi berbagai negara dan kota pintar lain di dunia, konsep *intelligent city* berhasil meningkatkan kualitas hidup sumber daya dan masyarakatnya seperti di Sejong Ibu Kota baru dari Korea Selatan, Bagi pemerintah Republik Indonesia, penerapan konsep *intelligent city* di IKN Nusantara tidak hanya dilakukan sebagai upaya dalam mensejajarkan IKN Nusantara dengan ibu kota lain yang telah mengusung konsep serupa, melainkan pula diharapkan dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia dalam mengembangkan konsep *intelligent city* sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya juga kelestarian lingkungan, termasuk memelihara kearifan lokal (*local wisdom*) Kalimantan Timur serta esensi dari kota hutan (*forest city*).

Smart security banyak memberi manfaat bagi kehidupan, organisasi/institusi maupun perusahaan, antara lain meningkatkan sistem keamanan untuk melindungi data dan informasi dan situs; melindungi kepercayaan masyarakat/konsumen; meningkatkan produktivitas organisasi/instansi maupun perusahaan; menjadi solusi untuk ancaman *cyber security* maupun kelancaran pemerintahan, layanan public maupun proses bisnis organisasi/institusi maupun perusahaan.

Pembahasan mengenai dampak keamanan cerdas (*smart city*) di IKN dibagi dalam dua aspek dampak positif antara lain : 1) Menjadikan hidup lebih mudah, teratur, praktis dan aman; 2) Dapat diatur dan dimonitor dari jarak jauh; 3) deteksi dini terhadap asset dan orang; 4) mempercepat informasi dan pengambilan Keputusan dan lain-lain.

Penerapan *smart security*, yang merupakan bagian dari pemolisian berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK), memerlukan dukungan regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), serta anggaran yang memadai. Selain itu, penerapan *smart policing* harus

mengutamakan pelayanan masyarakat, bukan hanya aspek keamanan. Ketika teknologi cerdas diterapkan, perlu diperhatikan isu-isu terkait privasi, hak-hak warga negara, dan keamanan data. Oleh karena itu, pemolisian harmoni yang memadukan keamanan modern dan pendekatan yang manusiawi harus diintegrasikan dengan konsep *smart community* dan *smart city* di wilayah IKN Nusantara. Hal ini bertujuan agar IKN dapat menjadi model pengembangan *smart city*.

Dengan integrasi ini, diharapkan bahwa keamanan dan pelayanan publik dapat ditingkatkan secara signifikan, sambil tetap menghormati hak-hak privasi dan kebutuhan masyarakat. Implementasi yang hati-hati dan terencana dengan baik akan memastikan bahwa *smart security* di IKN tidak hanya meningkatkan keamanan, tetapi juga mendukung pembangunan komunitas yang cerdas dan terhubung.

Sedangkan dampak-dampak negatifnya, antara lain :

- a. Terganggunya kenyamanan pribadi, dimana ada sebagai hak-haknya yang berkurang seperti rasa tidak bebas karena selalu diawasi oleh CCTV.
- b. Teknologi mahal harganya (ada kemungkinan disusupi/disadap jika investor dari asing)
- c. Ketergantungan kepada teknologi sangat tinggi
- d. Penyalahgunaan data pribadi
- e. Menggerus privasi masyarakat, dan lain-lain.

Dalam konteks IKN Nusantara sebagai *smart city* merupakan upaya pemerintah Republik Indonesia untuk mengusung pembangunan ekonomi yang inklusif, dengan menyebarkan magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa semata. IKN Nusantara sekaligus wujud pengarusutamaan simbol identitas bangsa, *green economy*, *green energy*, *smart transportation*, dan tata Kelola pemerintahan yang efisien dan efektif sebagai *milestone* transformasi besar bangsa Indonesia. Dalam perjalanannya, IKN Nusantara sejak awal dirancang sebagai katalis untuk membuka potensi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan,

dengan menjadikan IKN Nusantara sebagai simbol identitas bangsa serta pusat gravitasi ekonomi baru yang diharapkan dapat membawa *multiflier effect* dengan menjadikan episentrum pertumbuhan yang akan semakin merata ke wilayah luar Jawa guna mendukung pembangunan Indonesia Sentris menuju Indonesia Maju 2045.

IKN Nusantara diharapkan akan mampu menyebarluaskan manfaat pembangunan ekonomi. Jika IKN dipindah ke Provinsi yang memiliki konektivitas dengan provinsi lain yang baik, peningkatan arus perdagangan lebih dari 50% wilayah Indonesia dapat terjadi. Di samping itu juga akan menurunkan **kesenjangan** antar wilayah karena pemindahan ibu kota ke luar pulau Jawa mendorong perdagangan antar wilayah, mendorong investasi di provinsi ibu kota negara baru dan provinsi sekitarnya serta mendorong diversifikasi ekonomi, sehingga tercipta dorongan nilai tambah ekonomi pada sektor non-tradisional pada berbagai wilayah non Jawa. IKN Nusantara merupakan *milestone* Indonesia Maju 2045 yang ditopang dengan pembangunan Indonesia Sentris yang mendukung terciptakan pertumbuhan inklusif dan sekaligus mengirimkan pesan kepada dunia, bahwa IKN Nusantara ini bukan semata-mata memindahkan fisik ibu kota, memindahkan fisik kantor-kantor pemerintahan, namun lebih dari itu adalah upaya Indonesia membangun kota baru yang *smart*, kota baru yang kompetitif di tingkat global, membangun sebuah lokomotif baru untuk transformasi Indonesia yang berbasis inovasi dan berbasis teknologi dan *green economy*.

IKN Nusantara akan didukung dengan *smart transportation* yakni sistem transportasi kota yang dirancang berbasis integrasi pengembangan transportasi publik, sepeda, dan pedestrian dengan menerapkan *Integrated Information System*, *Intelligent Transport System*, dan *Innovative Public Transportation Network* serta mempromosikan kendaraan hemat bahan bakar dan ramah lingkungan (*electric car*).

Dari sisi pemanfaatan energi, IKN Nusantara akan menggunakan *Teknologi Smart Grid* memanfaatkan matahari sebagai sumber listrik, menggantikan listrik yang bersumber dari batu bara sehingga mengurangi jumlah CO₂ serta mampu mengontrol distribusi

energi listrik ketika sedang jam puncak dengan distribusi listrik menggunakan jaringan kabel bawah tanah.

Di samping itu, pemanfaatan *green building* yang ditandai oleh peningkatan efisiensi energi, pengurangan konsumsi air dan bahan, dan peningkatan kesehatan dan lingkungan, penggunaan peralatan yang hemat energi dan ramah lingkungan, penggunaan energi terbarukan, peningkatan kualitas udara dengan *heating and cooling system*, dan penggunaan sistem pencahayaan alami. *Smart city* yang akan mewarnai IKN Nusantara akan menjadikannya sebagai sebuah kota yang sehat, efisien, dan produktif ramah pejalan kaki dan pengguna sepeda serta menyediakan layanan keamanan dan kesehatan serta pendidikan *new smart metropolis* yang mampu menjadi pusat inovasi berkelas dunia.

Kebijakan pemindahan ibu kota yang telah diputuskan oleh pemerintah dan DPR dalam proses panjangnya telah melalui diskusi dan perencanaan yang matang, ditandai dengan tahapan kajian kebijakan yang komprehensif, di mana syarat formil dalam pembahasan UU telah mengikuti aturan perundang undangan yang berlaku, juga dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, akademisi, kalangan kampus, masyarakat lokal pemangku adat hingga kesultanan di Kalimantan Timur serta penyerapan aspirasi dari masyarakat. Pemindahan Ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara bukanlah tanpa argumen pendukung yang kuat dan valid. Hal ini didasari atas fakta antara lain bahwa beban Jakarta dan Jawa sudah terlalu berat. Dari data pendukung yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai sinkronisasi dari hasil Sensus Penduduk 2020 dengan data administrasi kependudukan (Admuduk) menunjukkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 271,35 juta jiwa hingga Desember 2020.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 131,79 juta jiwa atau 55,94% penduduk Indonesia berada di Jawa. Proporsi penduduk Indonesia yang berada di Sumatera mencapai 21,73%. Sebanyak 7,43% penduduk Indonesia berada di Sulawesi. Kemudian, 6,13% penduduk Indonesia berada di Kalimantan. Tingginya proporsi penduduk yang mendiami Pulau mengakibatkan beban Pulau Jawa, khususnya Jakarta sudah semakin berat, terutama dalam hal kepadatan penduduk, yang berimplikasi

menimbulkan beragam permasalahan turunan di antaranya kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah demikian pula dengan polusi udara dan air. Sebagai ilustrasi beban berat kemacetan lalu lintas di Jakarta menurut riset World Bank 2019 telah mengakibatkan kerugian ekonomi sebesar adalah Rp 65 triliun per tahun. Jakarta masuk dalam kategori kota dengan tingkat kemacetan sebesar 53 persen. Jakarta berada di peringkat 10 sebagai kota termacet di Asia. Akibat kemacetan tersebut, peningkatan 1 persen urbanisasi di Indonesia hanya bisa meningkatkan 1,4 persen Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Kontribusi ekonomi Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia atas Produk Domestik Bruto (PDB) sangat mendominasi atau “Jawasentris”. Hal ini dapat dicermati dari data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018. Kontribusi ekonomi terhadap PDB di Pulau Jawa sebesar 58,49 persen. Sebanyak 20,85 persen di antaranya disumbang oleh Jabodetabek. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa sebesar 5,61 persen.

Selain populasi, pemerintah menganggap ketersediaan air bersih menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menentukan lokasi ibu kota baru. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jawa khususnya Jakarta mengalami krisis air yang cukup parah. Sebagaimana kita ketahui bersama isu mengenai tenggelamnya Jakarta telah lama dibahas. Sejumlah kajian pun menyebutkan bahwa Jakarta terus mengalami penurunan permukaan tanah hingga 10 – 12 centimeter per tahun yang diikuti dengan krisis air bersih. Pada tingkat global Jakarta terancam tenggelam telah menjadi isu internasional setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengungkap prediksi bahwa DKI Jakarta bakal tenggelam dalam 10 tahun ke depan yang disampaikan dalam pidato tentang perubahan iklim di Kantor Direktur Intelijen Nasional AS.

- 15. Upaya-upaya yang dilakukan dalam membangun *Smart City* guna mewujudkan Kemanan dan ketertiban di IKN Nusantara**
 - a. Upaya

Upaya-upaya yang dilakukan dalam membangun *smart security* harus dimulai dari rekrutmen SDM Talenta yang dipersiapkan untuk mengelola smart security system di IKN Nusantara, yang kemudian akan diintegrasikan secara nasional. SDM Talenta akan dilatih di pusat-pusat laboratorium di negara mitra untuk mempelajari *hardware* dan *software* yang diperlukan, kemudian kembali ke tanah air untuk membangun *smart security system* secara mandiri demi kedaulatan negara. Semua *hardware* dan *software* akan divalidasi ulang oleh Tim SDM Talenta tersebut, untuk memastikan tidak ada “infiltrasi peralatan” dalam smart security system tersebut.

b. Strategi

Dalam **Kamus Besar Bahasa Indonesia** (KBBI) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Strategi” adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Untuk itu diperlukan metode atau teknik tertentu, sehingga kebijakan yang dihasilkan akan optimal dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pengertian teori strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Menurut Musa dan Najib (2018)²⁵ bahwa didalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada umumnya orang sering kali mencampuradukkan ke dua kata tersebut. Dalam kaitan dengan manajemen, ditegaskan bahwa manajemen strategi sebagai seperangkat keputusan-keputusan dan tindakan manajerial yang harus diambil oleh sebuah organisasi atau

²⁵ Hubies, Musa, dan Najib, M. 2008. *Manajemen Stratejik Dalam Pengembangan Daya Saing Organisasi*. PT. Alex Media Kom. Jakarta.

perusahaan untuk mencapai kinerja puncak atau tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi harus dirumuskan secara cermat dan komprehensif mengikuti ketentuan dalam merumuskannya seperti : a) Strategi harus menjelaskan dan menginterpretasikan masa depan, tidak hanya masa sekarang; b) arah strategi harus bisa menentukan rencana, bukan sebaliknya; c) strategi harus berfokus pada keunggulan kompetitif, tidak semata-mata pertimbangan keuangan; d) strategi harus diaplikasikan dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas; e) strategi harus mempunyai orientasi eksternal; dan f) fleksibilitas guna menyesuaikan dengan perkembangan; dan g) Strategi harus berorientasi pada hasil jangka panjang. Pada dasarnya, Strategi adalah Ilmu dan seni menentukan tujuan (*ends*), merumuskan cara-cara yang ditempuh (*ways*) dan menentukan sarana prasarana (*means*) yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sehingga rumusan suatu strategi harus mengandung tujuan (*ends*), cara-cara yang ditempuh (*ways*) dan sarana prasarana (*means*) yang digunakan. Secara esensial, bahwa strategi suatu strategi, meliputi *Ends* (sasaran, goals, objective, target), *Ways* (cara bertindak, *course of actions, concept, methode*) dan *Means* (sarana, kekuatan, sumber daya, potensi).

Dalam taskap ini, akan menggunakan SWOT Analisis untuk mengetahui posisi dari pembangunan *smart security* di IKN Nusantara ditinjau dari berbagai faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor-faktor eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Dari keempat faktor tersebut akan dianalisis, sehingga diketahui posisi dimana dan menggunakan strategi apa untuk dapat menjaga eksistensi maupun melakukan ekspansi. Strategi yang dapat digunakan adalah strategi SO (*Strength and Oppurtunity*), Strategi ST (*Strength and Threats*), Strategi WO (*Weakness and Oppurtunity*) dan Strategi WT (*Weakness and Threats*).²⁶

²⁶ <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/view/22178/10532> (diakses tanggal 30 Mei 2024 jam 12:00)

Upaya merupakan kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan (KKBI). Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar. Upaya merupakan usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Dengan daya Upaya adalah suatu keinginan yang kuat untuk mendapatkan apa yang diinginkan, sehingga timbul energi dan semangat untuk melakukan kegiatan tertentu. Pada prinsipnya daya Upaya berkaitan dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan, maka kita selalu memiliki semangat untuk memperbaiki diri dan terus bertumbuh menjadi pribadi yang baik.

Guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di IKN Nusantara harus dilakukan upaya-upaya sungguh-sungguh mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, supervisi dan evaluasi secara holistik, komprehensif dan integral mencakup berbagai aspek maupun integral yang melibatkan semua komponen bangsa berbasis *pentha helix*. Hal tersebut sangat urgen dilakukan mengingat kondisi kamtibmas yang kondusif menjadi prasyarat untuk melaksanakan Pembangunan Nasional. Tanpa kamtibmas yang kondusif, pemerintah akan sangat sulit untuk membangun negeri.

Dalam Pasal 1 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Perkataan aman dalam pemahaman tersebut mengandung 4 (empat) pengertian dasar, yaitu: a) *Security* yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis; b) *Surety* yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran; c) *Safety* yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya; dan d) *Peace* yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah. Sedangkan makna kata tertib dan

ketertiban dalam Undang-undang tersebut adalah suatu kondisi dimana unit sosial termasuk di dalamnya adalah warga masyarakat dengan segala fungsi dan posisinya dapat berperan sebagaimana ketentuan yang ada.

Di era Globalisasi yang didukung kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan dan mempengaruhi pola berpikir, perilaku, dan tuntutan masyarakat. Sebagai aparat yang berkewajiban melindungi, melayani dan menegakkan hukum untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus memiliki kemampuan yang mumpuni, baik secara organisasi, SDM, standar operasi maupun dukungan sarana prasarana. Sejalan dengan perkembangan teknologi digital 4.0 dan *Society 5.0*, saat ini dan ke depannya masyarakat menuntut layanan Polri yang *smart* dan profesional, yang mampu menghadapi tantangan dan perkembangan masyarakat era digital yang semakin kompleks.

Kemajuan teknologi dan informasi juga memunculkan bentuk kejahatan baru dengan modus yang lebih canggih, seperti kejahatan siber, transaksi keuangan illegal, penipuan, pencurian data pribadi dan penyebaran berita bohong (ahox). Bahkan para teroris dan kelompok ekstrim pun telah memanfaatkan teknologi digital dalam melakukan rekrutmen, pelatihan dan operasi kejahatannya. Harus menjadi komitmen seluruh elemen bangsa agar Pembangunan Nasional dapat berjalan lancar untuk menjadikan Indonesia Maju. Namun, dalam perjalanannya dihadapkan pada dinamika perkembangan lingkungan yang terus berubah dengan cepat sehingga Polri dituntut untuk berani melakukan adaptasi dan perubahan sesuai dengan perkembangan lingkungan tersebut yang membawa tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat baru.

Reformasi Birokrasi Polri perlu terus dilanjutkan, bahkan dipercepat, sehingga harapan terwujudnya postur Kepolisian RI yang semakin profesional, humanis, bebas KKN dan terpercaya dapat segera terlaksana. Harapannya, dapat melahirkan inovasi yang semakin memudahkan dan meningkatkan pengawasan keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan lingkungan yang semakin kondusif. Berbagai

pencapaian yang telah dilaksanakan Polri melalui inovasi layanan masyarakat seperti *E-Samsat*, *SIM Online*, *SKCK Online*, *Smart SIM*, *E-Tilang* dan lain sebagainya. Inovasi seperti ini tentunya telah memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri. Keberhasilan pelaksanaan reformasi organisasi tentunya juga harus didukung oleh profesionalisme aparatur yang diwujudkan melalui sistem manajemen yang baik. Pola-pola pendidikan dan pelatihan SDM harus berorientasi pada jawaban atas kebutuhan organisasi dan masyarakat. Dan harus dibarengi dengan SDM unggul yang menguasai IPTEK menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan dan mengantisipasi perubahan. Pendidikan, pelatihan dan riset di bidang IPTEK kepolisian harus menjadi bagian tak terpisahkan dalam kaitannya dengan peningkatan profesionalisme SDM di lingkungan Polri. Oleh karena itu, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi harus dilihat sebagai sarana pendukung. Penguasaan teknologi komunikasi dan informasi bukan dalam konteks sebagai user (pengguna) semata, namun harus benar-benar dapat dilakukan penguasaan keilmuannya. Sehingga benar-benar mandiri dan mampu berkompetisi serta antisipatif dalam menghadapi perkembangan situasi yang berubah sangat dinamis dan cepat. Diperlukan juga pendidikan kepemimpinan yang berkarakter Pancasila, *smart*, yang mampu mentransformasikan pengetahuan, mengelola sumber daya, menjadi role model dan berorientasi pada solusi. Pemimpin yang *smart* akan menjadikan organisasi mampu mencapai totalitas *smart policing*, yaitu mewujudkan postur Polri yang efektif dalam rangka mendukung Pembangunan Nasional.

Tantangan ke depan akan semakin kompleks, sehingga POLRI untuk menghadapi terhadap isu-isu geopolitik, ekonomi, teknologi, dan perubahan iklim. Di sisi lain, pelaksanaan tugas Polri juga sangat berpengaruh terhadap ketahanan bangsa dalam menghadapi beragam tantangan serta daya saing bangsa di tengah kompetisi global. Sehingga ke depan Polri harus makin peka, adaptif dan memiliki cara pandang strategis. Harus menjadi *cooling system* dan perekat kebinekaan, harus profesional dan tidak tebang pilih dalam penegakan hukum serta harus

memiliki kemampuan teknis yang lebih unggul dari pelaku-pelaku kejahatan. Dalam menghadapi kejahatan transnasional yang makin canggih, Presiden menekankan pentingnya Polri untuk adaptif dan memiliki kemampuan teknis yang unggul. Polri juga harus mampu mengikuti perkembangan iptek dan menjalin kerja sama untuk memperkuat keamanan negeri kita.

Upaya-upaya membangun *smart security* yang holistik dan integral melibatkan semua pemangku kepentingan (*stake holders*) berbasis kolaborasi *pentha helix* (pemerintah, perguruan tinggi, industri, masyarakat dan media). Dimana cakupannya menyangkut regulasi, kelembagaan, SDM, teknologi dan anggaran, sehingga implementasi *smart security* menciptakan kondusifitas keamanan dan ketertiban masyarakat di IKN Nusantara terwujud.

Regulasi yang harus dipersiapkan adalah Peraturan OIKN mengenai pemanfaatan Teknologi Informasi untuk membangun *smart security* yang terintegrasi dengan *smart city* yang didukung oleh kelembagaan yang terintegrasi dengan POLRI, dipersiapkan SDM Talenta yang akan mengelola *smart security*, pemanfaatan teknologi informasi dengan dukungan anggaran yang memadai. Disamping itu, Upaya juga berkaitan dengan mendayagunakan M-7 yaitu *man, money, material, method, machine, marketing dan minute (time)*. Hal-hal tersebut dianalisis secara mendalam dari berbagai faktor internal maupun eksternal secara cermat, tepat dan cepat; terlebih situasi dan kondisi global sangat dinamis, berubah sangat cepat dan cenderung destruktif akibat kiris pangan, energi dan kemanusiaan akibat perang.

Selanjutnya harus dikembangkan pemolisian masyarakat (*Community Policing*) yang merupakan suatu kegiatan Kepolisian untuk mengajak melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, untuk mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalah. Implementasi dari sistem pemolisian masyarakat selalu dilandasi oleh prinsip yang sama, yaitu bahwa hukum dan ketertiban masyarakat (*law and order*) tidak akan dapat ditangani

hanya oleh petugas penegak hukum sendiri, melainkan melalui kerja sama (sinergitas) yang erat antara polisi dan masyarakat.

POLRI dalam rangka mewadahi partisipasi masyarakat, melalui program Bimbingan Masyarakat (Bimmas), Sistem Keamanan Swakarsa (Siskamswakarsa) maupun Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling). Namun upaya ini belum dirasa cukup, karena masih menempatkan polisi pada posisi yang belum sejajar dengan warga masyarakat. Warga ditempatkan sebagai pihak yang “di bina” dan polisi selalu menempatkan dirinya sebagai “pembina”. Masyarakat hanya sebagai obyek dan polisi sebagai subjek yang “serba lebih”, sehingga dianggap figur yang mampu menangani dan menyelesaikan semua permasalahan Kamtibmas yang dihadapi masyarakat. Arogansi kekuasaan dan kekuatan POLRI oleh oknum di mata Masyarakat masih dirasa, sehingga menyebabkan adanya jarak antara warga dan polisi.

Perbandingan di beberapa Negara, misalnya Jepang yang telah dijadikan model pemolisian masyarakat lebih dititikberatkan pada pelayanan kepada warga oleh polisi pada level yang dekat dengan kehidupan warga. Polisi membangun Koban dalam Bahasa Jepang berarti sebuah “kotak terbuka”. Dalam kepolisian Jepang, istilah Koban adalah sebuah “pos polisi” yang terbuka selama 24 jam untuk melindungi masyarakat. Koban/Chuzaisho merupakan pos pelayanan terpadu polisi terdepan yang melayani masyarakat di bawah wewenangnya (*one-stop, full front-line service post*). Di pedesaan Jepang, chuzaisho dengan satu petugas yang tinggal di sana bertanggung jawab terhadap 100 keluarga atau sekitar 500 warga. Tujuan koban adalah “untuk menjamin keamanan dan kedamaian warga setempat, menjaga hubungan dengan anggota Masyarakat dan mengetahui apa yang sedang terjadi dalam masyarakat.

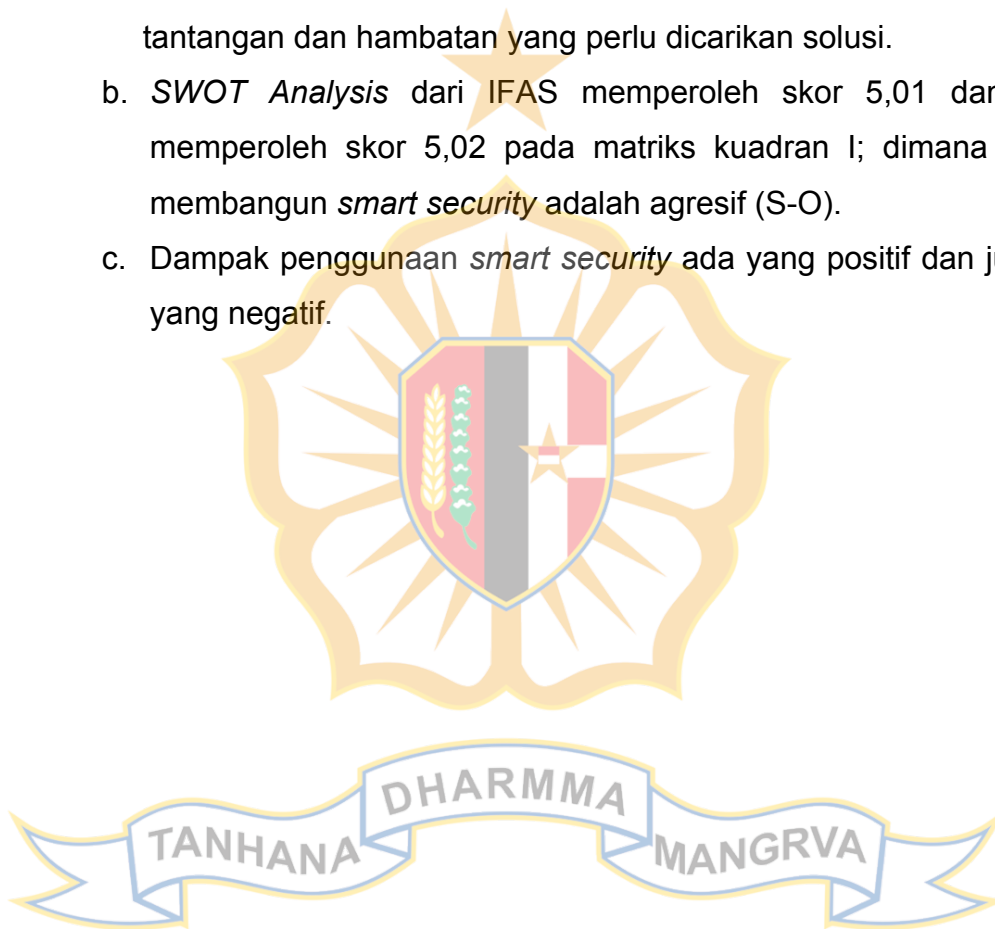
Sistem pemolisian masyarakat di Singapura dilakukan pada level Pos Polisi Lingkungan (*Neighborhood Police Post/NPP*). NPP menitikberatkan pada penciptaan hubungan baik dengan masyarakat dan meningkatkan citra polisi. Sebelumnya polisi Singapura tampil sebagai organisasi “paramiliter” dan telah menciptakan citra yang buruk akibat tindakannya menggunakan kekerasan dalam mengendalikan

kerusuhan massa. Pos Polisi Lingkungan (NPP) di Singapura dijaga oleh polisi yang bertugas untuk menciptakan hubungan baik dan positif dengan masyarakat.

16. Hasil Analisis

Berdasarkan pembahasan diatas, dihasilkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Konsep membangun *smart security* guna mewujudkan kemandirian dan ketertiban Masyarakat di IKN tidak mudah, menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang perlu dicarikan solusi.
- b. *SWOT Analysis* dari IFAS memperoleh skor 5,01 dan EFAS memperoleh skor 5,02 pada matriks kuadran I; dimana strategi membangun *smart security* adalah agresif (S-O).
- c. Dampak penggunaan *smart security* ada yang positif dan juga ada yang negatif.



BAB IV PENUTUP

17. Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa :

- a. Konsep *Smart Security* yang akan dibangun di IKN Nusantara adalah pemolisian yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi. Hambatan tersebut meliputi rendahnya tingkat kesiapan masyarakat, keterbatasan kualitas dan kapasitas masyarakat lokal, sengketa lahan seluas 2.086 hektar, serta mobilitas penduduk ke IKN yang tidak sesuai rencana pemerintah yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Selain itu, keterbatasan akses masyarakat lokal ke IKN juga berpotensi menimbulkan konflik, dan gangguan terhadap budaya serta kearifan lokal. Model sistem pemerintahan asimetris di Otorita IKN (OIKN) juga menjadi hambatan yang perlu diperhatikan
- b. Dampak *Smart Security* terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat di IKN juga harus dipertimbangkan. Dampak positifnya termasuk peningkatan kemudahan, keteraturan, kepraktisan, dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem ini memungkinkan deteksi dini terhadap aset dan orang, serta percepatan informasi dan pengambilan keputusan, dengan pengaturan dan monitoring yang dapat dilakukan dari jarak jauh. Namun, ada dampak negatif yang perlu diperhatikan, seperti gangguan privasi masyarakat akibat pengawasan yang intensif, potensi penyusupan atau penyadapan teknologi oleh pihak asing serta risiko ketergantungan yang sangat tinggi pada teknologi yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan data pribadi.
- c. Untuk membangun *Smart Security* guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di IKN, diperlukan upaya-upaya yang komprehensif, holistik dan integral dengan melibatkan semua pemangku kepentingan melalui kolaborasi *penta helix* (pemerintah, perguruan tinggi, industri, masyarakat dan media). Dimana cakupan upaya ini meliputi aspek regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, teknologi dan anggaran.

Pendekatan ini diharapkan dapat mengatasi berbagai hambatan yang ada serta memaksimalkan dampak positif dari implementasi Smart Security di IKN Nusantara.

18. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan diatas, direkomendasikan sebagai berikut :

- a. Otorita IKN Nusantara bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk merencanakan dan membangun smart security yang terintegrasi dengan *smart city* di IKN Nusantara.
- b. Otorita IKN Nusantara bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalin kolaborasi berbasis *pentha* dalam membangun *smart security* yang terintegrasi dengan *smart city* di KN Nusantara.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan :

- UUD NRI 1945 (Cita-cita dan Tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945).
 UU No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.
 UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
 Peraturan Presiden Republik Indonesia No.59 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
 Peraturan Presiden Republik Indonesia No.62 Tahun 2022 Tentang Otorita IKN.
 Peraturan Presiden Republik Indonesia No.63 Tahun 2022 Tentang Rincian Rencana Induk IKN.
 Peraturan Presiden Republik Indonesia No.64 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional IKN Tahun 2022-2042.

Buku/Jurnal :

- Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori Dan Terapan (Jakarta: Bumi Aksara, 1994).
- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. PT Grafindo Persada, Jakarta.
- Albino, V., Berardi, U., & Dangelico, R. M. (2015). Smart Cities: Definitions, Dimensions, Performance, and Initiatives. *Journal of Urban Technology*, 22(1), 3-21.
- Arikunto, Suharsimi 2011, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Ed.Rev.VI.Cet.1, Jakarta, Rineka Cipta.
- Caragliu, A., Del Bo, C., & Nijkamp, P. (2011). Smart Cities in Europe. *Journal of Urban Technology*, 18(2), 65-82. Shakya, T. (1999). *The Dragon in the Land of Snows: A History of Modern Tibet Since 1947*. Columbia University Press.
- Dewi, Maulida R, dkk. 2020. Analisis Kesiapan Masyarakat Kecamatan Sepaku dan Samboja Terhadap Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota Vol.16 No 4*. H. 300-313. (<https://ejournal.undip.ac.id> diakses tanggal 3 Februari 2023, Pukul 22.25 WIB).
- Hollands, R. G. (2008). Will the real smart city please stand up? Intelligent, progressive or entrepreneurial? *City*, 12(3), 303-320.
- Nam, T., & Pardo, T. A. (2011). Conceptualizing Smart City with Dimensions

of Technology, People, and Institutions. Proceedings of the 12th Annual International Digital Government Research Conference: Digital Government Innovation in Challenging Times, 282-291.

Pidato Presiden Joko Widodo dalam Ulang Tahun ke-50 Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAPI), April 2021.

Internet :

<https://bappenas.go.id> (diakses tanggal 4 Maret 2024, Jam 19.00 WIB)

<https://sdgs.bappenas.go.id> (diakses tanggal 4 Maret 2024, Jam 20.00 WIB.)

<https://bps.go.id> (diakses tanggal 4 Maret 2024, Jam 21.00 WIB)

<https://www.lemhannas.go.id> (diakses tanggal 7 Maret 2024, Jam 19.00 WIB)

<http://lib.lemhannas.go.id> (diakses tanggal 7 Maret 2024, Jam 20.00 WIB)

<https://ppukab.bps.go.id/> (diakses tanggal 11 Maret 2023, Jam 19.00)

<https://kukarkab.bps.go.id> (diakses tanggal 11 Maret 2024, Jam 20.00 WIB.)

<https://kajiannawacita.org> (diakses tanggal 4 April 2024, Jam 20.00 WIB)

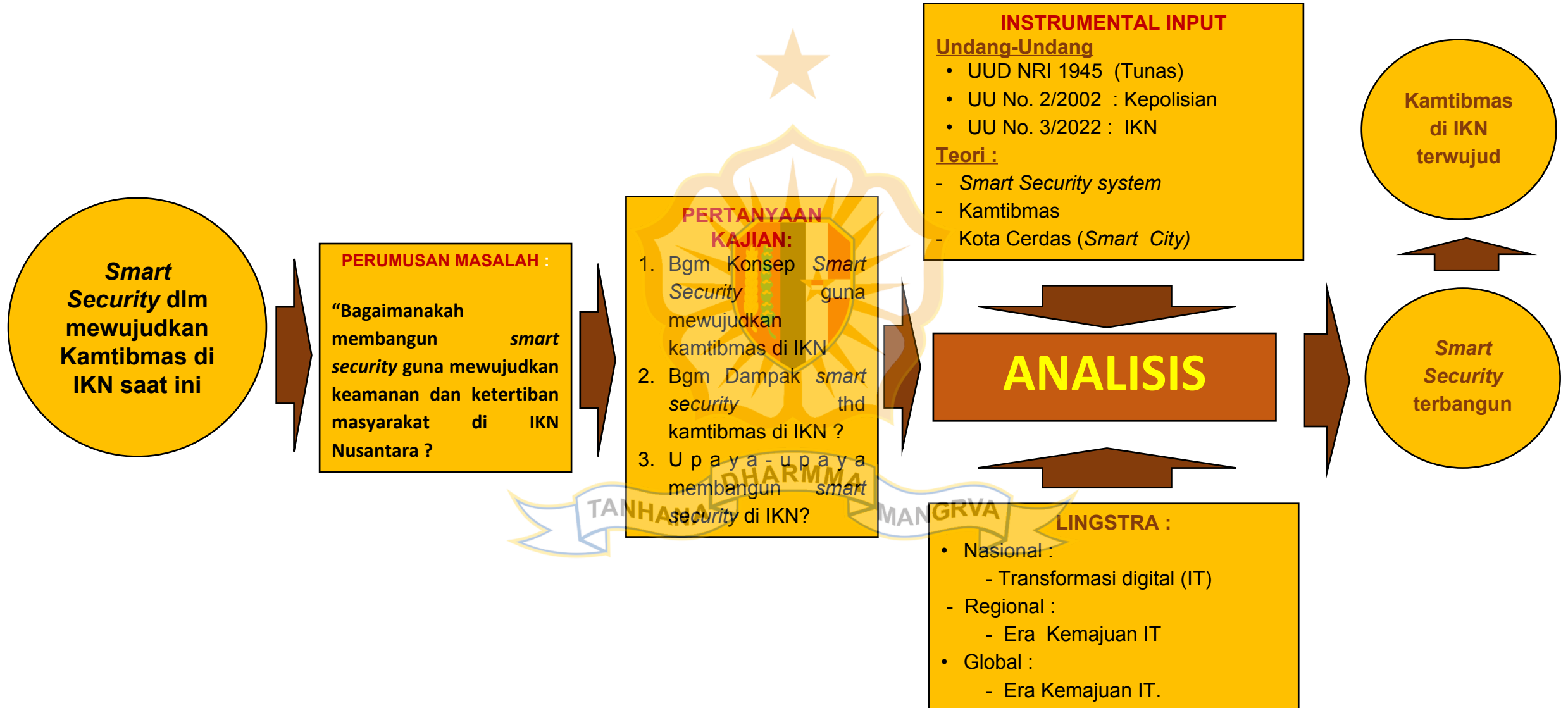
www.impinews.com (diakses tanggal 4 April 2024, Jam 21.00 WIB)

<https://humas.polri.go.id/2023/12/21/kapolri-paparkan-konsep-smart-security-untuk-polres-ikn/>



ALUR PIKIR :

MEMBANGUN *SMART SECURITY* GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI IBU KOTA NUSANTARA



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama Lengkap : **SATRIA RIZKIANO, S.IK, M.Si, M.M**
2. Pangkat/Nrp : Komisaris Besar Polisi
3. Jabatan : Anjak Madya Bid. Bindiklat LEMDIKLAT POLRI
4. Tempat/ Tgl Lahir : Jakarta, 16 Maret 1973
5. Agama : Islam
6. Suku : Minang
7. Alamat : Kebayoran Village Blok B 08 Pd.Aren Sektor 7 Bintaro,
Tangerang Selatan
8. Pendidikan Umum : S2 Universitas Riau - Pekanbaru
S2 Sekolah Tinggi Manajemen IMMI – Jakarta
9. Dik Kepolisian : AKABRI 1997
PTIK 2005
SESPIMMEN 2013
10. Nama Istri : HENNY FITRIANI H.P, S.SOS
11. Nama Anak : NADHIRA MARZIA PUTRI RIZKIANO

12. Riwayat Jabatan : (5 Jabatan Terakhir)

- a. Kabidpengsos Setukpa Lemdiklat Polri
- b. Kasubag Sumda Bagrenmin Sops Polri
- c. Kasubdit Gakkum Ditpolair Polda Sulawesi Barat
- d. Kapolres Grobogan Polda Jateng
- e. Kapolres Bangka Selatan Polda Kep.Babel



Jakarta, Agustus 2024

Penulis

SATRIA RIZKIANO, S.IK, M.Si, M.M

KOMBES POL. NRP 73030686

